

SKRIPSI



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEEKELAHIAN KELOMPOK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN OLEH GENG MOTOR

(Studi Kasus Putusan No. 826/Pid.B/2012/PN.Mks)

**OLEH:
DEWI AQSARIYANTI SIMEN
B111 09 125**

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PERKELAHIAN KELOMPOK YANG MENYEBABKAN
KEMATIAN OLEH GENG MOTOR**

(Studi Kasus Putusan No. 826/Pid.B/2012/PN.Mks)

Disusun dan Diajukan Oleh :

DEWI AQSARIYANTI SIMEN

B111 09 125

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Dalam Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa proposal skripsi mahasiswa:

Nama : DEWI AQSARIYANTI SIMEN

Nomor Induk : B111 09 125

Bagian : HUKUM PIDANA

Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PERKELAHIAN KELOMPOK YANG MENYEBABKAN
KEMATIAN OLEH GENG MOTOR

(Studi Kasus Putusan No.826/Pid.B/2012/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, April 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof.Dr.Muhadar S.H., M.H.
NIP.19590317 198703 1 002

Haeranah S.H.,M.H
NIP.196612122 991032 002

ABSTRAK

DEWI AQSARIYANTI SIMEN(B111 09125), dengan judul skripsi **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkelahian Kelompok yang Menyebabkan Kematian Oleh Geng Motor (Studi Kasus Putusan No. 826/Pid.B/2012/PN.Mks)”** di bawah bimbingan **Bapak Muhadar** sebagai pembimbing I dan **Ibu Haeranah** sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil dalam perkara tindak pidana perkelahian kelompok yang menyebabkan kematian dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana perkelahian kelompok yang menyebabkan kematian dalam perkara putusan No.826/Pid.B/2012/PN.Mks.

Penelitian ini dilaksanakan di instansi Pengadilan Negeri Makassar. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan dan interview. Selanjutnya data yang diperoleh disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Penerapan hukum pidana materiil oleh Hakim dalam Putusan Perkara No.826/Pid.B/2012/PN.Mks telah tepat, karena tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa telah memenuhi unsur secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang lain yang ditetapkan dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP dan para terdakwa mampu bertanggung jawab. Pidanaan terhadap para terdakwa juga telah sesuai dengan ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP. (2) Majelis Hakim Perkara No.826/Pid.B/2012/PN.Mks telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana baik secara yuridis maupun sosiologis. Secara yuridis, tidak ada hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap terdakwa. Namun secara sosiologis, hal-hal yang memberatkan pidana adalah perbuatan Para terdakwa dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat akibat pencitraan buruk geng motor dan menimbulkan duka mendalam bagi pihak keluarga korban. Sementara hal-hal yang meringankan pidana adalah Para Terdakwa bersifat sopan di persidangan dan mengakui serta menyesali perbuatan dan tidak akan diulangnya lagi, Para terdakwa masih muda usia sehingga masih diharapkan memperbaiki kelakuannya untuk masa depan, dan Para terdakwa masih terdaftar dan berstatus pelajar, dan masih ingin untuk melanjutkan pendidikannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat anugerah dan karunia-Nya yang telah memberikan penulis Ilmu, kesehatan, kesabaran dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkelahian Kelompok yang Menyebabkan Kematian Oleh Geng Motor(Studi Kasus Putusan No. 826/Pid.B/2012/PN.Mks)”**.

Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana dalam bagian Hukum Pidana program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dengan rasa hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tuaku **Ayahanda Nico Simen S.H**, dan **Ibunda Dr. Titi S. Slamet, S.H, M.H.** atas segala pengorbanan, kasih sayang dan jerih payahnya selama membesarkan dan mendidik penulis, selalu memberikan motivasi, serta doa yang tak henti-hentinya demi keberhasilan penulis.

Buat saudaraku Eko Septiyanto Simen dan Vinny Elsa Della Riska, tante, om, sepupu-sepupu dan seluruh keluarga besarku yang selalu menyayangi penulis, memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr.dr. Idrus A. Paturusi selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M. S, DFM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Romi Librayanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Haeranah, S.H., MH.selaku Pembimbing II yang telah membantu dan meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan kepada penulis.
5. Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. Ibu Dara Indrawati, S.H., M.H. dan Bapak Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji.
6. Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H selaku Penasehat Akademik Penulis.
7. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak berjasa mendidik penulis sehingga berhasil menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

8. Staf Pengurus Akademik beserta jajarannya terkhusus untuk Pak Bunga dan ka' Tia selaku Staf Akademik angkatan 2009 yang tak kenal lelah membantu penulis selama kuliah.
9. Ketua Pengadilan Negeri Makassar beserta jajarannya yang telah memberikan bantuan, meluangkan waktunya dan kerja samanya selama penulis melakukan penelitian.
10. Hakim Pengadilan Negeri Makassar Bapak Nathan Lambe S.H.,M.Hyang telah membantu selama penelitian.
11. Bapak Mustari, S.H, yang telah membantu kelancaran penulis dalam menjalani penelitian selama di Pengadilan.
12. Yang tercinta Sandhy G. J.I. Sarapajary yang selalu setia dan sabar dalam membantu dan memberikan semangat penulis dalam perkuliahan hingga penyelesaian penulisan skripsi penulis.
13. Sahabat terbaik di Fakultas Hukum Unhas Vinny Elsa Della Riska, Nurhikmah Saleh, NurAfni, Rita Handayani, Heidy Maritje Carlin Bororing, dan Hijriah Maulani Nanda Syahputri, yang selalu mendukung dalam perkuliahan dan penyelesaian penulisan skripsi penulis.
14. Teman-teman anggota KKN Reguler Angkatan 82 Tahun 2012 Desa Allakuang, Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidrap dan juga kepada "Petta dan Puang" sebagai orang tua kami selama di posko terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya selama KKN dan teman-teman seperjuangan Angkatan 2009 yang

tergabung dalam “Doktrin” yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang luput dari kesalahan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini, harapan penulis kiranya skripsi ini akan bermanfaat bagi yang membacanya. Tuhan Memberkati. .miiin.

Makassar, 24 April 2013

Penulis

Dewi Aqsariyanti Simen

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING....	iii
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Perkelahian Kelompok oleh Geng Motor	
A.1 Pengertian tindak pidana	6
A.2 Pengertian tindak pidana perkelahian kelompok	11
A.3 Ketentuan pidana tindak pidana perkelahian kelompok	13
A.4 Syarat – Syarat Penjatuhan Pidana	15
B. Pengertian geng motor	19
C. Pidana dan tujuan pembedaan	
C.1 Pengertian pidana	23
C.2 Teori- teori pembedaan	25
C.3 Jenis- jenis pidana	32
D. Hal yang dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana	33

BAB III METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian	39
2. Teknik Pengumpulan Data	39
3. Jenis dan Sumber Data	40
4. Analisa Data	40

BAB IV PEMBAHASAN

A. Penerapan Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Perkelahian Antar Kelompok Dalam Perkara Putusan Nomor 826/Pid.B/2012/PN MKS	
1. Posisi Kasus.....	41
2. Dakwaan Penuntut Umum.....	43
3. Tuntutan penuntut Umum.....	43
4. Amar Putusan.....	44
5. Komentar penulis.....	45
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku tindak pidana secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban.....	49
1. Pertimbangan Hakim.....	50
2. Analisis Penulis.....	74

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kenakalan remaja yang sedang hangat dibicarakan baik dari segi faktor penyebab dan cara penanggulangannya adalah kenakalan remaja geng motor. Kelahiran geng motor, rata-rata diawali dari kumpulan remaja yang hobi balapan liar dan aksi-aksi yang menantang bahaya pada malam menjelang dini hari di jalan raya. Setelah terbentuk kelompok, bukan hanya hubungan emosinya yang menguat, dorongan untuk unjuk gigi sebagai komunitas *bikers* juga ikut meradang. Mereka ingin tampil beda dan dikenal luas. Caranya, tentu bikin aksi-aksi yang sensasional. Mulai dari kebut-kebutan, tawuran antar geng, tindakan kriminal tanpa pandang bulu mencuri di toko, hingga perlawanan terhadap aparat keamanan.

Faktor lain yang juga ikut berperan menjadi alasan mengapa remaja saat ini memilih bergabung dengan geng motor adalah kurangnya sarana atau media bagi mereka untuk mengaktualisasikan dirinya secara positif. Remaja pada umumnya lebih suka memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Namun, ajang-ajang lomba balap yang legal sangat jarang digelar. Padahal, ajang-ajang seperti ini sangat besar manfaatnya, selain dapat memotivasi untuk berprestasi, juga sebagai ajang aktualisasi diri. Karena sarana aktualisasi diri yang positif ini sulit mereka dapatkan, akhirnya

mereka melampiaskan dengan aksi ugal-ugalan di jalan umum yang berpotensi mencelakakan dirinya dan orang lain.

Disisi lain masalah kenakalan remaja geng motor ini telah mencapai tingkat yang meresahkan bagi masyarakat dan merupakan problema aktual yang dihadapi orang tua, masyarakat dan terlebih-lebih masalah penting yang dihadapi oleh pemerintah dan Negara.

Tindakan yuridis yang dilakukan oleh kepolisian terhadap para remaja yang melakukan tindakan kriminal dapat diterima. Karena hal itu bermanfaat untuk menciptakan rasa aman dan rasa terlindungi pada masyarakat dari tindak kekerasan dan kekejaman mereka.¹

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana perkelahian kelompok antar Geng Motor digolongkan ke dalam kejahatan terhadap ketertiban umum (BAB V Pasal 170 ayat (1) - ayat (2) KUHP).

Adapun Pasal 170 KUHPidana, berbunyi sebagai berikut :²

- (1) Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam :
 - a) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

¹ Hurlock, *Remaja dan Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998

² Pasal 170 KUHP

- b) Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
- c) Dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh komunitas geng motor merupakan hal yang unik karena walaupun secara umum perbuatan tersebut dicela oleh masyarakat tetapi oleh anggota geng motor hal tersebut bukan dipandang sebagai perbuatan menyimpang tetapi perbuatan yang menantang adrenalin, perbuatan yang lumrah dilakukan dan halal untuk dilakukan menurut mereka (anggota geng motor). Fenomena tersebut sangat menarik jika dikaji suatu persepsi anggota geng motor terhadap tindak pidana penganiyaan, karena suatu pelaku tidak akan berhenti melakukan kejahatan apabila pelaku tidak menyadari bahwa perbuatannya tersebut dicela masyarakat atau perbuatan tersebut betul-betul perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah hukum.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian dan membahas mengenai upaya penegakkan hukum terhadap masalah perkelahian antar kelompok yang dilakukan Geng Motor terutama yang terjadi di Kota Makassar, dengan meneliti perkara putusan Nomor 826/Pid.B/2012/PN MKS. Dengan judul :

“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkelahian Antar Kelompok yang Menyebabkan Kematian yang Dilakukan Oleh Geng Motor”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil pada tindak pidana Perkelahian Kelompok yang menyebabkan kematian dalam perkara Putusan Nomor 826/Pid.B/2012/PN.MKS?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana perkara Nomor 826/Pid.B/2012/PN.MKS?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a) Untuk mengetahui penerapan pidana materil pada tindak pidana Perkelahian Kelompok yang menyebabkan kematian dalam perkara Putusan Nomor 826/Pid.B/2012/PN.MKS.
- b) Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor 826/Pid.B/2012/PN.MKS.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a) Dari hasil penelitian ini hendaknya memberikan pengetahuan yang lebih kepada penulis mengenai penerapan ketentuan pidana Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana Perkelahian Kelompok yang menyebabkan kematian dalam perkara Putusan Nomor 826/Pid.B/2012/PN.MKS.
- b) Memberikan gambaran yang jelas kepada penulis mengenai pertimbangan hukum Hakim dalam perkara Putusan Nomor 826/Pid.B/2012/PN.MKS.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Perkalahian Kelompok Remaja

A.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*. Andi zainal abidin adalah salah seorang ahli hukum pidana Indonesia yang tidak sepakat dengan penerjemahan *strafbaar feit* menjadi tindak pidana. Adapun alasannya adalah sebagai berikut:

- a. Tindak tidak mungkin dipidana, tetapi orang yang melakukanlah yang dapat dijatuhi pidana;
- b. Ditinjau dari segi Bahasa Indonesia, tindak adalah kata benda dan pidana juga kata benda. Yang lazim ialah kata benda selalu diikuti kata sifat, misalnya kejahatan berat, perempuan cantik, dan lain-lain;
- c. Istilah *strafbaar feit* sesungguhnya bersifat eliptis yang kalau diterjemahkan secara harfiah adalah peristiwa yang dapat dipidana, oleh Van Hatum bahwa sesungguhnya harus dirumuskan *feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is* yang berarti peristiwa yang menyebabkan seseorang dapat dipidana. Istilah *criminal act*

lebih tepat, karena ia hanya menunjukkan sifat kriminalnya perbuatan.

Terjemahan atas istilah *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, *strafbaar feit*, dan sebagainya.

Sedangkan pengertiannya, menurut Simons tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesetiaan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan "*strafbaar feit*", maka timbullah dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut.

strafbaar feit sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.

Pendapat beberapa ahli mengenai tindak pidana adalah :

- a. Menurut Pompe *strafbaar feit* secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu : “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum)” yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
- b. Van merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai “suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak- hak orang lain. ”
- c. Menurut Simons *strafbaar feit* itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang- undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”
- d. Menurut E. Utrecht *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau melalaikan *natalen-negatif*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).³

Tindak Pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenakan sanksipidana (hukuman).

³ Erdianto effendi, Hukum Pidana Indonesia, Refika Adiamas, 2011, hal 96-98

Unsur-unsur tindak pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi subjektif dan segi objektif.

- a) Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
- b) Dari segi subjektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jadi, memang ada unsur kesengajaan.

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
- b) Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c) Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.

- d) Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.

Setelah mengetahui beberapa tindak pidana ke dalam unsur-unsurnya, kita dapat melihat jenis-jenis tindak pidana, baik yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang sendiri maupun yang telah dilakukan oleh para ahli hukum pidana di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana.

Para ahli hukum telah membagi tindak pidana ke dalam tiga jenis tindakan yang mereka sebut *criminal atrocissima*, *atrocia* dan *levia* yang tidak didasarkan pada suatu azas tertentu, melainkan hanya didasarkan pada berat-ringannya hukuman yang telah diancamkan terhadap masing-masing kejahatan.

Para pembentuk Kitab Undang-undang Hukum Pidana, semula telah membuat suatu pembagian ke dalam apa yang mereka sebut *rechtsdelicten* dan apa yang mereka sebut *wetsdelicten*.

Sesuai dengan penjelasannya di dalam *Memorie Van Toelichting*, pembagian di atas itu telah didasarkan pada sebuah azas yang berbunyi :

- a) Adalah merupakan suatu kenyataan bahwa memang terdapat sejumlah tindakan-tindakan yang mengandung suatu "onrecht" sehingga orang pada umumnya memandang bahwa pelaku-pelakunya itu memang pantas untuk dihukum, walaupun tindakan-tindakan tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak

dinyatakan sebagai tindakan yang terlarang di dalam undang-undang.

- b) Akan tetapi juga terdapat sejumlah tindakan-tindakan, di mana orang pada umumnya baru mengetahui sifatnya dari tindakan-tindakan tersebut sebagai tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum hingga pelakunya dapat dihukum, yaitu setelah tindakan-tindakan tersebut dinyatakan sebagai tindakan-tindakan yang terlarang di dalam undang-undang.⁴

A.2 Pengertian Tindak Pidana Perkelahian Kelompok

Yang dimaksud dengan perkelahian menurut pasal 358 KUHP merupakan suatu penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang turut serta dalam perkelahian tersebut. perbedaan hakiki antara penyerangan dan perkelahian.⁵ Menurut M. Sudrajat Bassar⁶, penyerangan berbeda dengan perkelahian. Penyerangan berarti suatu perkelahian di mana salah satu pihak ada yang memulai, sementara perkelahian adalah suatu perkelahian di mana kedua belah pihak yang terlibat sama-sama saling memulai.

Pasal 358 KUHP sebagai dasar hukum bagi tindak pidana kejahatan perkelahian kelompok ataupun penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang (lebih dari dua), yang akibatnya ada korban di salah satu

⁴ Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984, hal198-200

⁵ Pasal 358 KUHP

⁶ M.Sudrajat Bassar, Hukum Pidana (Pelengkap KUHP), Armco, Bandung, 1983, hal 130

atau kedua belah pihak, di mana korban tersebut menderita luka parah atau mati. Begitu banyaknya orang yang terlibat (massa), sehingga tidak dapat diketahui siapa yang telah melukai atau membunuh orang itu.

Mereka yang terlibat ataupun melibatkan diri dalam perkelahian atau pun penyerangan kelompok, selain dapat didakwakan dengan pasal 358 KUHP juga dapat pula dikenakan pasal-pasal mengenai penganiayaan dan pembunuhan bilamana di antara mereka tersebut ada diketahui atau dapat dibuktikan sebagai pelaku yang menyebabkan orang lain (lawannya) luka parah atau meninggal.

Meninjau Pasal 358 KUHP lebih jauh, yang diatur dalam pasal tersebut adalah akibat yang ditimbulkan dari perbuatan atau tindakan penyerangan atau perkelahian kelompok. Luka parah dan meninggalnya orang suatu akibat yang harus dikenakan hukuman. Mereka yang terlibat dengan maksud hendak melindungi pihak yang lemah atau memisah perkelahian kelompok itu oleh undang-undang tak dapat dikategorikan sebagai turut serta dalam perkelahian atau penyerangan.

Seperti diketahui bersama bahwa suatu proses penyerangan maupun perkelahian kelompok dengan sendirinya telah direncanakan dan spontanitas, artinya usulan yang ada sifatnya spontanitas kemudian mereka yang terlibat maupun melibatkan diri melakukan perencanaan untuk mengadakan penyerangan atau perkelahian dengan kelompok lainnya⁷

⁷Dikutip dari <http://raypratama.blogspot.com>, 2011, *Perkelahian Kelompok-kelompok*

A.3 Ketentuan Tindak Pidana Perkelahian Kelompok

Perencanaan perkelahian kelompok yang menyebabkan orang lain (pihak lawan) menderita luka parah dapat dikenakan dengan pasal-pasal mengenai penganiayaan misalnya Pasal 353 dan Pasal 355 KUHP yang berbunyi:

Pasal 353 KUHP:⁸

- (1) Penganiayaan dengan direncanakan lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun;
- (2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, maka yang bersadipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun;
- (3) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Pasal 355 KUHP:⁹

- (1) Penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun;
- (2) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang maka yang bersalah dipidana dengan penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Pasal lain di dalam KUHP yang dikenakan bagi pelaku perkelahian kelompok, dimana adanya orang yang meninggal dunia dari perkelahian kelompok tersebut adalah Pasal 340 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dulu menghilangkan nyawa orang, karena bersalah melakukan pembunuhan berencana, dipidana dengan pidana penjara mati atau seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.

Upaya untuk membuktikan apakah pelaku-pelaku daripada perkelahian kelompok itu dapat dikenakan Pasal 353, Pasal 355 dan

⁸ Pasal 353 KUHP, ayat (1) – ayat (3)

⁹ Pasal 355 KUHP ayat (1) – ayat (2)

Pasal 340 KUHP bukanlah hal yang mudah, sehingga memerlukan proses penyidikan dan peradilan.

Perkelahian kelompok dapat pula dikenakan Pasal 170 KUHP yang berbunyi sebagai berikut berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan;
- (2) Tersalah dihukum
 1. dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka;
 2. dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh;
 3. dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang;
- (3) Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini.

Selain Pasal 170 KUHP, maka pelaku perkelahian kelompok dapat pula dikenakan Pasal 358 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

"Barangsiapa dengan sengaja turut campur dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain daripada tanggungannya masing-masing bagi perbuatan yang khusus, dihukum:

1. Penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, jika penyerangan atau perkelahian itu hanya menjadikan ada orang mendapat luka berat saja.
2. penjara selama-lamanya empat tahun, jika penyerangan atau perkelahian itu menjadikan ada orang mati"

Perkelahian kelompok menurut Pasal 170 KUHP dan Pasal 358 KUHP tergolong ke dalam tindak pidana kejahatan, hal ini dapat dibuktikan dengan terdapatnya unsur penting dalam perkelahian kelompok sehingga digolongkan sebagai tindak pidana. Adapun perbedaan antara Pasal 170 dengan Pasal 358 KUHP, yaitu di dalam Pasal 170 lebih ditekankan terhadap kejahatan terhadap ketertiban umum, yakni kekerasan

yang dilakukan secara terbuka dilakukan terhadap manusia atau barang. Dalam pelanggaran Pasal 170 ini, seorang pelaku itu tidak dipertanggung jawabkan terhadap akibat-akibat yang memberatkan yang dilakukan oleh lain-lain peserta di dalam kejahatan.

Sedangkan Pasal 358, lebih ditekankan kepada penganiayaan, yakni mereka yang bersalah ikut bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang membuat kejahatan itu selesai dilakukan. Juga apabila penyelesaian itu dilakukan oleh orang lain.

A.4 Syarat – Syarat Penjatuhan Pidana

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Menurut Roeslan Saleh, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan.

Meskipun tidak secara tegas dinyatakan bahwa Hukum Pidana positif Indonesia menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan, penggunaan asas ini tidak dapat dibantah lagi adanya. Lebih-lebih lagi setelah diperkuat dengan UU NO. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa :

“ Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Asas kesalahan dalam hukum pidana adalah suatu asas yang fundamental. Sebab, asas itu telah begitu meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran-ajaran penting dalam hukum pidana. Akan tetapi asas "tiada pidana tanpa kesalahan" tidak boleh dibalik menjadi "Tiada kesalahan tanpa pidana". Dengan demikian hubungan dari kesalahan dan pemidanaan akan menjadi jelas, yaitu bahwa kesalahan itu merupakan dasar dari pidana.

Kesalahan dapat pula dibagi dalam dua kelompok besar yaitu kesengajaan dan kealpaan. Kesalahan dalam hukum pidana mempunyai beberapa pengertian, yang sudah lazim dipakai di Indonesia, yaitu di samping kesalahan yang diartikan sebagai suatu kesengajaan, kesalahan juga diartikan sebagai berikut :

1. sifat tercela (umumnya ini merupakan syarat yang tidak tertulis) bagi suatu perbuatan yang belum pasti dapat dihukum, tetapi pelakunya sudah dapat dicela (*verwijbaar*) karena melakukan perbuatan yang tidak terpuji.
2. Kesalahan / *schuld* dalam arti kecerobohan (adanya niat), jadi dalam hal ini sudah terkandung unsur kesengajaan dan kealpaan bersama-sama. Karenanya istilah kesalahan atau *schuld* di sini hanya suatu penamaan saja. Kadang-kadang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *roekeloos*.

3. Kealpaan (*nalatigheid*), seperti yang disebut dalam Pasal 359 KUHP, yang juga diterjemahkan sebagai kurang hati-hati.

Kesalahan di sini diartikan secara umum, yaitu perbuatan yang secara objektif tidak patut, karenanya perbuatan itu setidaknya-tidaknya dapat dicela. Sedangkan kesalahan sebagai suatu kesengajaan masih dapat dibagi lagi dalam :

- a. Dengan maksud (*met het oogmerk*). Disebut juga *dolus directus* (sebab memang akibat perbuatannya itu diharapkan timbul, atau agar peristiwa pidana itu sendiri terjadi).
- b. 1) Dengan kesadaran sebagai suatu keharusan atau kepastian (*als Zekerheids bewustzijn*); Bahwa akibat atau perbuatannya sendiri terjadi.
2) Dengan kesadaran sebagai suatu kemungkinan saja (*als Mogelijkheid-bewustzijn*).
- c. Kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*). Kesengajaan bersyarat di sini diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan ia mengetahui, yang mengarah kepada suatu kesadaran bahwa akibat yang dilarang kemungkinan besar terjadi. Suatu kemungkinan besar atau sebagai suatu kemungkinan yang tidak dapat diabaikan itu diterima dengan begitu saja, atau "*dolus eventualis*".

Berdasarkan pandangan demikian, Muladi dan Dwidja Priyatno menyatakan bahwa kesalahan mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Jadi orang yang bersalah melakukan perbuatan itu berarti bahwa perbuatan itu dapat dicelaan kepadanya. Dan dengan demikian, maka kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya. Sehingga dengan demikian untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut ialah :

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat
- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan
- c. Tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf

Ada dua hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu :

1. Berkenaan dengan keadaan pelaku perbuatan pidana, apakah pelaku dapat dianggap mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga adakah alasan pemaaf
2. Berkenaan dengan perbuatan si pelaku itu sendiri, apakah ada sifat melawan hukum (kesalahan) atau tidak, atau adakah alasan pemaaf pembenar.

Pertanggungjawaban Pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk pidana dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana dalam konsep KUHP tersebut bertolak dari pemikiran yang disebut Ide Keseimbangan yang mencakup :

- a. Keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum atau masyarakat dan kepentingan umum atau individu
- b. Keseimbangan antara unsur atau faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan faktor subjektif(orang/batin/sikap batin)
- c. Keseimbangan antara kriteria formal dan materiil

B. Pengertian Geng Motor

Pengertian geng motor adalah sekumpulan orang memiliki hobi bersepeda motor yang membuat kegiatan berkendara sepeda motor secara bersama sama baik tujuan konvoi maupun touring dengan sepeda motor. pengertian geng motor ini sebenarnya berawal dari sebuah kecenderungan hobi yang sama dari beberapa orang, namun belakangan geng motor semakin meresahkan masyarakat. pengertian geng motor memang melekat dengan kekerasan, hal ini karena beberapa geng motor

¹⁰ Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal 117-122

belakangan telah berubah dari kumpulan hobi mengendarai motor menjadi hobi menganiaya orang, hingga hobi melakukan aksi perampokan. geng motor awalnya berkembang di kota bandung, namun sekarang geng motor bisa kita temukan hampir di setiap kota seperti Jakarta, Surabaya, Medan bahkan merembet ke kota-kota kecil seperti kediri, malang, siantar dan sebagainya.

Geng Motor Dari Segi Hukum, Geng motor merupakan kelompok sosial yang memiliki dasar tujuan yang sama atau asosiasi yang dapat disebut suatu paguyuban tapi hubungan negatif dengan paguyuban yang tidak teratur dan cenderung melakukan tindakan anarkis. Salah satu kontributor dari munculnya tindakan anarkis adalah adanya keyakinan/anggapan/perasaan bersama (collective belief). Keyakinan bersama itu bisa berbentuk siapa yang cenderung dipersepsi sebagai maling (dan oleh karenanya diyakini pantas untuk dipukuli) ; atau situasi apa yang mengindikasikan adanya kejahatan (yang lalu diyakini pula untuk ditindak lanjuti dengan tindakan untuk melawan).

Pada dasarnya kemunculan hal-hal seperti simbol geng, tradisi dan lain-lain itu mengkonfirmasi bahwa masyarakat setempat mendukung perilaku tertentu, bahkan juga bila diketahui bahwa itu termasuk sebagai perilaku yang menyimpang Adanya dukungan sosial terhadap suatu penyimpangan, secara relatif, memang menambah kompleksitas masalah serta, sekaligus kualitas penanganannya.

secara perilaku, dukungan itu bisa juga diartikan sebagai munculnya kebiasaan (*habit*) yang telah mendarah-daging (*innate*) dikelompok masyarakat itu. Adanya geng-geng motor mengakibatkan adanya pula kecenderungan peningkatan anarki di masyarakat. Pencegahan anarki perlu dilakukan sebelum tindakan itu tumbuh sebagai kebiasaan baru di masyarakat mengingat telah cukup banyaknya kalangan yang merasakan “asyik”-nya merusak, menjarah, menganiaya bahkan membunuh dan lain-lain tanpa dihujat apalagi ditangkap. Para pelaku geng motor memang sudah menjadi kebiasaan untuk melanggar hukum. Kalau soal membuka jalan dan memukul spion mobil orang itu biasa dan sering dilakukan pada saat konvoi.

Setiap geng memang tidak membenarkan tindakan itu, tapi ada tradisi yang tidak tertulis dan dipahami secara kolektif bahwa tindakan itu adalah bagian dari kehidupan jalanan. Apalagi jika yang melakukannya anggota baru yang masih berusia belasan tahun. Mereka mewajarkannya sebagai salah satu upaya mencari jati diri dengan melanggar kaidah hukum. Kondisi seperti ini sangat memprihatinkan dan perlu penyikapan yang bijaksana.

Sekarang geng-geng motor sudah berada dalam taraf berbahaya, tak segan mereka tawuran dan tanpa merasa berdosa para geng tersebut membunuh. Perbedaan mencolok dari geng motor dan club motor adalah :

1. Kebanyakan anggota geng motor tidak memakai perangkat *safety* seperti helm, sepatu dan jaket.
2. Membawa senjata tajam yang dibuat sendiri atau udah dari pabriknya seperti samurai, badik hingga *bom Molotov*.
3. Biasanya hanya beraksi padamalam hari dan tidak menggunakan lampu penerang serta berisik.
4. Jauh dari kegiatan sosial
5. Anggotanya lebih banyak ke pada kaum, pemabukk, penjudi. Sekalipun tidak menutup kemungkinan wanita juga ikut.
6. Motor yang mereka gunakan bodong, tidak ada spion, sein, hingga lampu utama. Visi dan misi mereka jelas, hanya membuat kekacauan dan ingin menjadi geng terseram diantara geng motor lainnya hingga sering terjadi tawuran diatas motor.
7. Tidak terdaftar di kepolisian atau masyarakat setempat.
8. Lebih suka ditempat yang jauh dari kata terang. Lebih memilih tempat sepi, gelap dan bau busuk.
9. Kalau pelantikan anak baru biasanya bermain fisik.

Namun sekarang perlu diwaspadai karena ada geng motor yang berkedok club motor. Berpakaian rapi, *safety* dan penuh perlengkapan

berkendaraan namun arogan, anarkis dan egois kalau di jalan serta tak segan mereka membuat rusuh bila merasa diganggu. Selama AD/ART mereka jelas dan terdaftar di pihak kepolisian, club motor tidak bakal berubah menjadi geng motor.¹¹

C. Pidana dan Tujuan Pemidanaan

C.1 Pengertian Pidana

Menurut Simons, Hukum Pidana adalah

“Kesemua perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan negara yang diancam dengan suatu nestapa (pidana/sanksi) barangsiapa yang tidak mentaatinya. Kesemua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum dan kesemua aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.”

Sedangkan menurut W.L.G. Lemaire, Hukum Pidana adalah :

“Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut”.

¹¹ Dikutip dari <http://www.kemhan.com>, 2012, *Pengertian geng motor kenakalan remaja*.

Jadi setelah melihat pengertian-pengertian Hukum pidana dari beberapa para ahli tersebut maka, pengertian Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.

Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang ringan. Ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan. Sedangkan kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.

Apakah pidana itu? Tujuan hukum pidana tidak terus dicapai dengan pengenaan pidana, tetapi merupakan upaya represif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan. Pidana perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum (pidana).

Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Inilah perbedaan antara pidana dan tindakan karena tindakan dapat berupa nestapa juga, tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki pembuat.

Muladi dan Barda Nawawi Arief menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);

Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang. Tujuan hukum Pidana ada dua macam, yaitu :¹²

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana (fungsi preventif/pencegahan);
2. Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat (fungsi represif/kekerasan)

C.2 Teori-Teori Pemidanaan

Sementara itu yang dimaksud dengan pemidanaan adalah tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seorang terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto :

“Penghukuman berasal dari kata dasar hukum , sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1969, h. 11

hukumannya (*berschen*) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu maka tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya yaitu penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali bersinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.”¹³

Menurut M. Sholehuddin tujuan pemidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban, dan pelaku.

M. Sholehuddin mengemukakan sifat-sifat dari unsur pidana berdasarkan atas tujuan pemidanaan tersebut, yaitu :

1. Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang. Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
2. Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat).¹⁴

¹³ Soedarto. 1975. *Hukum Pidana Jilid I A-B*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang hal 36

¹⁴ M. Sholehuddin : *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana* 2004 hal 59

Tujuan pemidanaan dalam hubungannya dengan usaha penanggulangan kejahatan korporasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penanggulangan kejahatan korporasi yang dilakukan secara integratif melalui kebijakan penal dengan menggunakan sarana hukum pidana dan penanggulangan kejahatan korporasi melalui kebijakan non penal dengan menggunakan sarana selain hukum pidana (Andi Abu Ayyub Saleh).¹⁵

Sementara itu menurut Muladi tujuan pemidanaan haruslah bersifat integratif, yaitu : ¹⁶

1. Perlindungan masyarakat;
2. Memelihara solidaritas masyarakat;
3. Pencegahan (umum dan khusus);
4. Pengimbalan/pengimbangan.

Dalam masalah pemidanaan dikenal ada dua sistem atau cara yang biasa diterapkan mulai dari jaman *Wetboek van Strafrecht* (W. v. S) Belanda sampai dengan sekarang yang diatur dalam KUHP, yaitu :

1. Bahwa orang dipenjara harus menjalani pidananya dalam tembok penjara. Ia harus di asingkan dari masyarakat ramai dan terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka yang bebas.

¹⁵ Dikutip dari <http://raypratama.blogspot.com>, 2012, *Pengertian Jenis-Jenis dan Tujuan*.

¹⁶ Muladi Lembaga Pidana bersyarat 2004 hal 11

Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan di belakang tembok penjara;

2. Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/resosialisasi.

Berkaitan dengan pembedaan, maka muncullah teori-teori mengenai hal tersebut :

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.¹⁷

- b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doeltheorien*)

menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan. Dengan demikian, harus

¹⁷ Andi Hamzah, 2005, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hal 31

ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian, teori ini juga dinamakan teori tujuan. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi (prevensi). Teori relatif ini melihat bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi. Menurut Zevenbergen, "terdapat tiga macam memperbaiki si penjahat, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral."¹⁸ Perbaikan yuridis mengenai sikap si penjahat dalam hal menaati undang-undang. Perbaikan intelektual mengenai cara berfikir si penjahat agar ia insyaf akan jeleknya kejahatan. Sedangkan perbaikan moral mengenai rasa kesusilaan si penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi.

c. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang hukum pidana, muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana. Akan tetapi di pihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif, kelemahan kedua teori tersebut adalah (Hermien Hadiati Koeswadji):

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro Tindak-tindak Pidana Tertentu Indonesia, Bandung, 2003 hal 26

Kelemahan teori absolut :

1. Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada.
2. Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya Negara saja yang memberikan pidana?

Dengan munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang.

Yang pertama, yaitu menitik beratkan unsur pembalasan dianut oleh Pompe. Pompe menyatakan :¹⁹

” Orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum ”.

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan, ia menyatakan :²⁰

”Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat”.

¹⁹ Andi Hamzah, 2005, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hal 36

²⁰ Andi Hamzah, 2005, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hal 36

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitik beratkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.

Teori yang dikemukakan oleh Grotius tersebut dilanjutkan oleh Rossi dan kemudian Zennenberg, yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana ialah pembalasan tetapi maksud tiap-tiap pidana melindungi tata hukum. Pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintahan.

Teori gabungan yang kedua yaitu menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya.

Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela, pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana ialah melindungi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Vos :

”pidana berfungsi sebagai prevensi umum, bukan yang khusus kepada terpidana, karena kalau ia sudah pernah masuk penjara ia tidak terlalu takut lagi, karena sudah berpengalaman.”

Teori gabungan yang ketiga, yaitu yang memandang pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Menurut E. Utrecht teori ini kurang dibahas oleh para sarjana.

C.3 Jenis-Jenis Pidana

Jenis-jenis pidana dapat dilihat dari Pasal 10 KUHP. Pasal 10 KUHP menentukan adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok adalah :

1. Hukuman mati;
2. Hukuman penjara;
3. Hukuman kurungan;
4. Hukuman denda.

Sedangkan hukuman tambahan adalah :

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan/penyitaan barang-barang tertentu; dan
3. Pengumuman putusan hakim.

Perbedaan antara hukuman pokok dan hukuman tambahan, adalah hukuman pokok terlepas dari hukuman lain, berarti dapat dijatuhkan kepada terdakwa secara mandiri. Adapun hukuman tambahan hanya merupakan tambahan pada hukuman pokok, sehingga tidak dapat dijatuhkan tanpa ada hukuman pokok (tidak mandiri).

D. Hal Yang Di Pertimbangkan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Sudikno Mertokusuno, mengemukakan ada 3 tahapan tugas seorang Hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu :²¹

a. Tahap konstatir

Hakim mengkonstatir benar atau tidaknya peristiwa yang dijatuhkan. Dalam tahap konstatir ini kegiatan hakim bersifat logis. Penguasaan hukum pembuktian bagi hakim, sangat dibutuhkan dalam tahap ini.

b. Tahap kualifikasi

Hakim kemudian mengkualifisir termasuk hubungan hukum apa tindakan seseorang tersangka. Dalam hal ini dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum.

c. Tahap konstituir

Di sini hakim menetapkan hukumnya terhadap yang bersangkutan (para pihak atau terdakwa). Di sinio hakim menggunakan sillogisme, yaitu menarik kesimpulan dari *premis mayor* berupa aturan hukumnya dan *premis minor* berupa tindakan terdakwa.

Hakim menemukan hukum melalui sumber-sumber hukum yang tersedia. Diantaranya undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi,

²¹ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum : Suatu Pengantar, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1993, hal : 91

putusan desa, doktrin, hukum agama, dan bahkan keyakinan hukum yang dianut oleh masyarakat.

Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, UU. No. 14 Tahun 1970, dalam pasal 27 ayat 1 mengatur bahwa :

“Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Adapun penambahan dari Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia yang baru, yaitu UU. No. 48 Tahun 2009, Pasal 5 ayat 1 mengatur bahwa :

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

Adapun metode penemuan hukum oleh hakim dapat kita bedakan atas 2 jenis, yaitu :²²

- a. Metode interpretasi yaitu, penafsiran terhadap teks undang-undang, masih tetap berpegang pada bunyi teks itu.
- b. Metode konstruksi yaitu, hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, di mana hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.

²² Achmad Ali, 1996, Mengungkap tabir hukum, chandra pratama, Jakarta, hal 164-166

Aspek “pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan” merupakan konteks penting dalam putusan hakim. Hakekatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestanddelen*) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Dapat dikatakan lebih jauh bahwasanya pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/dictum putusan hakim.

Putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim. Setelah pemeriksaan selesai, maka hakim karena jabatannya harus melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Pemeriksaan dianggap telah selesai apabila telah melalui tahap jawaban dari tergugat, replik dari penggugat, duplik dari tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak.

Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli.²³

²³ R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung, Mandar Maju, 2005, Hal. 146.

Lazimnya, dalam praktik peradilan dalam putusan hakim sebelum “pertimbangan-pertimbangan yuridis” ini dibuktikan dan dipertimbangkan maka hakim terlebih dahulu akan menarik “fakta-fakta dalam persidangan” berorientasi pada dimensi tentang: *locus* dan *tempus delicti*, *modus operandi* bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana, kemudian bagaimanakah akibat langsung dan tidak langsung dari perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan sebagainya.

Selanjutnya, setelah “fakta-fakta dalam persidangan” tersebut diungkapkan, pada putusan hakim kemudian akan dipertimbangkan terhadap unsur-unsur (*bestanddelen*) dari tindak pidana yang telah didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Sebelum mempertimbangkan unsur-unsur (*bestanddelen*) tersebut, menurut praktik lazimnya dipertimbangkan tentang hal-hal bersifat korelasi antara fakta-fakta, tindak pidana yang didakwakan, dan unsur kesalahan terdakwa .

Pada hakikatnya, dalam pembuktian terhadap pertimbangan-pertimbangan yuridis dari tindak pidana yang didakwakan maka majelis hakim haruslah menguasai mengenai aspek teoretik dan praktik, pandangan doktrin yurisprudensi, dan kasus sejenis yang sedang ditangani, kemudian secara limitatif menetapkan “pendiriannya”.

Dalam putusan hakim suatu tanggapan dan pertimbangan tersebut dibuat dalil, terperinci dan substansial terhadap kasus pembuktian yang

pelik, dimana terdakwa/penasehat hukum tidak sependapat dengan tuntutan pidana dan sebagainya. Jadi, singkat dan konkretnya harus diterapkan tanggapan dan pertimbangan tersebut kasuistik sifatnya.

Perihal “penegasan tentang tindak pidana yang terbukti/tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa “ esensial sifatnya. Dalam pertimbangan pada putusan hakim, apabila unsur-unsur (*bestanddelen*) tindak pidana yang didakwakan telah terbukti, lazimnya putusan hakim, redaksionalnya dapat berupa kalimat: “Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan....melanggar Pasal....telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang sepadan dengan perbuatannya.”

Sedangkan apabila terhadap unsur-unsur (*bestanddelen*) dari tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti, haruslah ada pernyataan hakim dalam putusan agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan. Misalnya, terhadap aspek ini dapat kita ambil contoh dengan redaksional kalimatnya sebagai berikut, yaitu: “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan angka ... sampai dengan ... di atas maka majelis berkesimpulan bahwa unsure ad.b ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan unsur berikutnya tidak perlu

dipertimbangkan lagi sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair.”²⁴

Kemudian setelah pencantuman unsur-unsur tersebut di atas, lazimnya dalam praktik pada putusan hakim selanjutnya langsung dipertimbangkan “hal-hal yang memberatkan” dan “hal-hal yang meringankan”. Kalau kita mencermati KUHP, maka adapun alasan-alasan yang meringankan beratnya hukuman dalam KUHP adalah percobaan, membantu dan belum dewasa. Alasan-alasan yang memberatkan hukuman dalam KUHP adalah kedudukan sebagai jabatan, *recidive* dan *samenloop*.

Alasan-alasan yang mengurangi beratnya hukuman di luar KUHP adalah terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan, mengakui dan menyesali kesalahan, dan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Alasan-alasan yang menambah beratnya hukuman di luar KUHP adalah terdakwa tidak jujur dan berbelit-belit, tidak mengakui kesalahannya, perbuatannya keji dan tidak berperikemanusiaan serta pernah melakukan tindak pidana sebelumnya.

²⁴ Lilik Mulyadi. 2010. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya. Bandung: Citra Aditya Bakti. hal. 224

BAB 3

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi atau tempat penelitian yang dipilih adalah Pengadilan Negeri Makassar.

B. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- a. Penelitian dilakukan dengan teknik mempelajari pembuktian, laporan penelitian, surat kabar, sumber-sumber tertulis lainnya yang ada relevansinya dengan obyek penelitian. Dari hasil telaah sumber tertulis tersebut, penulis jadikan sebagai landasan teoritis.
- b. Penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara sehingga dapat memberikan masukan mengenai masalah yang menjadi obyek penelitian.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif yang bersumber dari :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara langsung dengan Hakim yang bersangkutan di dalam instansi yang bersangkutan terkait langsung dengan penelitian yang dilakukan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bentuk laporan dan bahan dokumen tertulis lainnya seperti Undang-undang, arsip data dari instansi yang bersangkutan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder diolah terlebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

BAB. 4

PEMBAHASAN

A. Penerapan Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Perkelahian

Antar Kelompok Dalam Perkara Putusan Nomor
826/Pid.B/2012/PN MKS.

1. Posisi Kasus

Adapun awal dari kasus ini yaitu, pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya waktu lain dalam bulan April tahun 2012 bertempat di jalan Sungai Saddang atau setidaknya tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu Ibrahim Syamsari hingga menyebabkan kematian yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Setelah menghadiri acara syukuran SAPMA PP (Satuan siswa pelajar dan mahasiswa pemuda pancasila) yang diadakan di Hotel Horison, Saksi Budiyanto Budiman yang berboncengan dengan korban Ibrahim Syamsari bersama dengan lima motor lainnya milik teman saksi melintas di Jalan Jenderal Sudirman, disaat bersamaan para terdakwa dari jalan Ratulangi juga melintas di jalan tersebut. Karena merasa ditantang pada saat berpapasan, Jonathan (DPO) lalu berteriak "Ondangi-ondangi" sehingga motor yang dikendarainya bersama terdakwa Fardan Bin Haji. Baso Darwis (terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) serta para terdakwa lainnya memutar arah mengejar korban dan teman-temannya ke arah jalan Sungai Saddang. Saat berada di jalan Sungai Saddang salah satu pelaku yang belum diketahui identitasnya yang berboncengan tiga lalu memukul kepala korban secara berulang kali dengan menggunakan pipa besi. Pada saat berada didepan studio foto

glow, terdakwa Andi Agus Fardan Bin Haji. Baso Darwis memepet motor korban ke pinggir jalan, Jonathan (DPO) lalu menendang motor tersebut hingga saksi dan korban terjatuh dengan motornya. Setelah jatuh saksi lalu melarikan diri ke arah Sungai Tangka sedangkan korban yang berusaha bangkit dihampiri oleh terdakwa I Sri Buyung lalu menendang ke arah wajah korban yang masih bisa ditangkis oleh korban tetapi tendangan berikutnya korban tidak dapat menangkisnya lagi sehingga mengenai wajah korban yang dilakukan beberapa kali. Saat korban berusaha melarikan diri, dari arah belakang saksi Takdir Bin Jaya menendang kaki korban, lalu korban dikejar oleh terdakwa I Sri Buyung, Guntur (DPO), Jonathan (DPO), Nurfan Alias Ippang (DPO) dan beberapa orang terdakwa lainnya, setelah korban didapat, korban lalu dikeroyok dengan cara dipukul dan ditendang. Korban kembali berusaha melarikan diri tetapi dicegat oleh terdakwa Muhammad Syukur Bin Muh. Arfah dan terdakwa Adnan HS (masing-masing sebagai terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), terdakwa Muhammad Syukur Bin Muh. Arfah lalu meninju pada bagian kepala, korban yang terus mencoba melarikan diri dikejar oleh Adnan HS dan memukul punggung korban sebanyak tiga kali, lalu Muhammad Syukur Bin Muh. Arfah membusur ke arah punggung korban dan menancap di punggung korban. Dalam keadaan terkena busur korban tetap berusaha melarikan diri yang kembali dikejar oleh terdakwa Asrul Manyingari dan Rizal Jaya (masing-masing sebagai terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), terdakwa Asrul Manyingari lalu menendang korban pada bagian paha sedangkan Rizal Jaya memukul wajah korban berulang kali. Setelah melakukan pemukulan Rizal Jaya lalu mengambil busur yang berada di motornya, sekitar 10 meter dari arah korban, Rizal Jaya lalu mengarahkan busur ke arah korban yang mengenai leher sebelah kiri korban, korban yang masih saja terus berlari dikejar Jonathan, setelah menggapainya Jonathan lalu mencabut busur yang menancap pada punggung korban, terdakwa II Andana Arib Abbas, Syarifuddin Alias Encong Bin Dg. Pudding (DPO), Guntur (DPO) serta terdakwa lainnya kemudian memukul serta menginjak-injak korban. Akibat perbuatan para terdakwa korban meninggal dunia.

Berdasarkan Visum et Repertum No. R/ 19/ Ver/ IV/ 2012 yang dibuat oleh dr. Firmansyah, kelainan-kelainan luka pada saat masuk rumah sakit dan yang terdapat pada pemeriksaan pertama atau pertolongan pertama sebagai berikut :

- Didapat luka robek diatas alis mata kiri berukuran 2 cm x 1cm 2 cm
- Tidak terdapat perlukaan di tempat lain, dari mulut, hidung dan telinga mengeluarkan darah segar.

Dengan kesimpulan pasien datang dalam keadaan meninggal. Korban diduga meninggal akibat benturan keras benda tumpul di daerah kepala yang mengakibatkan cedera kepala berat.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan pertama Penuntut Umum perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 Ayat 2 ke-3 KUHP. Dakwaan kedua Penuntut umum perbuatan perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat 3 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Jaksa penuntut umum telah mendapatkan keterangan dari para saksi dan keterangan dari para terdakwa serta melihat barang bukti – barang bukti dan juga surat yang berkaitan dengan perkara tersebut yang berupa Visum et Repertum No. R/ 19/ Ver/ IV/ 2012 yang dibuat dr. Firmansyah dari rumah sakit Pelamonia.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Berdasarkan berkas perkara dan surat-surat, keterangan saksi dan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Sri Buyung dan Terdakwa II Andana Arib Abbsa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan tenaga bersama

menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut” melanggar pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu kami

2. Menjatuhkan pidana terdakwa para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing 5 (lima) tahun, dikurangi selama para terdakwa menjalani tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti diserahkan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam pembuktian atas nama Terdakwa Rizal jayadi
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

4. Amar Putusan

Adapun yang menjadi amar putusan pada perkara ini adalah sebagai berikut :

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I Sri Buyung dan Terdakwa II Andana Alias Arib abbas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang lain”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Sri Buyung dan terdakwa II Andana Arib Abbas oleh karena itu dengan pidan penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun

3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar para terdakwa ditahan
5. Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

5. Komentar penulis

Berdasarkan putusan perkara No. 286/Pid.B/2012/PN.Mks menyatakan bahwa terdakwa I Sri Buyung dan terdakwa II Andana Alias Arib Abbas telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP.

Adapun unsur-unsur delik dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP sesuai yang di dakwakan oleh jaksa penuntut umum adalah:

1. Barang siapa

Bahwa pengertian barang siapa disini adalah siapa saja atau subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, serta tidak berada atau digantungkan pada suatu kedudukan atau kualitas tertentu. Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, para terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, dapat mengikuti persidangan dengan baik

dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula.

2. Dengan Terang-terangan dan tenaga bersama

Bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan dan tenaga bersama adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama yang menyebabkan terganggunya ketertiban umum, dengan kekerasan secara terbuka, yang dilakukan terhadap manusia atau barang. Dimana pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Sungai Saddang kota Makassar, telah terjadi perselisihan paham antara beberapa orang yang mengendarai sepeda motor yang terdiri dari kelompok para terdakwa dan kelompok pihak korban Ibrahim Samsari yang mana kejadian tersebut mengakibatkan pengeroyokan terhadap korban.

3. Melakukan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang

Bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang masuk kedalam Pasal 339 KUHP mengenai kejahatan terhadap nyawa dan Pasal 351 ayat 3 KUHP mengenai penganiayaan. Sebagaimana akibat dari pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa tersebut bersama dengan kelompoknya, korban mengalami luka dan meninggal dunia, dan melihat dari Visum et Repertum No. R/ 19/ Ver/ IV/ 2012 yang dibuat oleh dr. Firmansyah dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Pelamonia bahwa korban telah meninggal dunia.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis berpendapat, penerapan hukum materiil yang dilakukan oleh Jaksa penuntut Umum adalah bahwa Tindak Pidana pengroyokan melihat dari kulutur Hukum di Sulawesi Selatan. Pengroyokan itu merupakan Tindak Pidana yang merupakan suatu bentuk kejahatan yang timbul akibat sifat reaktif dari tingkah laku negatif warganya, perbuatan seperti minum-minuman keras hingga mabuk, kemudian berkumpul-berkumpul dengan pemuda-pemuda yang sama-sama mabuk, bergerombolan dengan maksud yaitu untuk menunjukkan kejantanan, dan menimbulkan keberanian untuk menantang orang lain. Reaksi dari unsur-unsur tersebut sifatnya pasti negatif karena apabila sudah terpengaruh dengan minuman beralkohol, pemuda-pemuda itu bisa secara sporadis menyerang dan menyakiti orang yang melewatinya.

Oleh karena itu Hukum Materiil yang di jadikan acuan oleh Jaksa Penuntut Umum ialah Jaksa Penuntut Umum mengikuti perkembangan penyidikan, juga melakukan penelitian hasil penyidikan atas nama para terdakwa. Berdasarkan hasil penyidikan dan keterangan saksi serta pengakuan dari para terdakwa, telah terbukti para terdakwa bersalah melakukan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut. Dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP yang berbunyi :

“Yang bersalah diancam : dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut”.

Kemudian Jaksa Penuntut Umum menuntut agar menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama para terdakwa menjalani tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan. Sedangkan Hakim memutuskan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun menimbang berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Menurut penulis, penerapan hukum tindak pidana secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang lain dalam putusan Nomor: 826/Pid.B/2012/PN.MKS telah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa. Unsur-unsurnya pun telah mencocoki rumusan delik. Mengenai putusan yang dijatuhkan hakim yaitu pidana penjara 4 (empat) tahun. Penulis sependapat dengan hal itu karena tentu saja dalam menjatuhkan putusannya Hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan, yang dalam hal ini dapat meringankan hukuman para terdakwa, sehingga hukuman yang dijatuhkan hakim lebih ringan daripada tuntutan jaksa. Salah satu diantaranya adalah para terdakwa tersebut masih di bawah umur, dan juga masih terdaftar dan berstatus pelajar.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku tindak pidana secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban

hakim merupakan mahkota dan puncak dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang hakiki, hak asasi, penguasaan hukum, faktual, visualisasi etika serta moralitas hakim yang hakim yang bersangkutan.

Oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum maka kita tidak hanya memenuhi rasa kepastian hukum tetapi juga memenuhi rasa keadilan.

Dalam upaya membuat putusan, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang – barang bukti, dan pasal – pasal perbuatan hukum pidana, serta pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa , ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya .

Berikut ini penulis akan menguraikan mengenai pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar putusan No. 286/Pid.B/2012/PN.MKS sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. REG.PERKARA: PDM-64/MKS/EP.2/05/2012 tanggal 15 Mei 2012 dimana para terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut dan melanggar pidana Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I Sri Buyung, terdakwa II Andana Arib Abbas bersama dengan Muhammad Syukur Bin Muh. Arfah, Andi Agus Fardan Bin Haji Baso Darwis, Asrul Manyingari, Rizal Jaya, Adnan HS (masing-masing sebagai terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), Syariffudin, Guntur, Jonathan, Nurfan, Irfan, Randi Adriano, Alfian, Topan, Baba, Imam (masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang) serta 3 orang lainnya yang belum diketahui identitasnya pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012 atau sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya waktu lain dalam bulan April tahun 2012 bertempat di jalan Sungai Saddang Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk mengadili, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu Ibrahim Syamsari jika kekerasan itu menyebabkan maut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa setelah menghadiri acara syukuran SAPMA PP (Satuan siswa pelajar dan mahasiswa pemuda pancasila) yang diadakan di Hotel Horison, Saksi Budiyanto Budiman yang berboncengan dengan korban Ibrahim Syamsari bersama dengan lima motor lainnya milik teman saksi melintas di Jalan Jenderal Sudirman, disaat bersamaan para terdakwa dari jalan Ratulangi juga melintas di jalan tersebut. Karena merasa ditantang pada saat berpapasan, Jonathan (DPO) lalu berteriak "Ondangi-ondangi" sehingga motor yang dikendarainya bersama terdakwa Fardan Bin Haji. Baso Darwis (terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) serta para terdakwa lainnya memutar arah mengejar korban dan

teman-temannya ke arah jalan Sungai Saddang. Saat berada di jalan Sungai Saddang salah satu pelaku yang belum diketahui identitasnya yang berboncengan tiga lalu memukul kepala korban secara berulang kali dengan menggunakan pipa besi. Pada saat berada didepan studio foto glow, terdakwa Andi Agus Fardan Bin Haji. Baso Darwis memepet motor korban ke pinggir jalan, Jonathan (DPO) lalu menendang motor tersebut hingga saksi dan korban terjatuh dengan motornya. Setelah jatuh saksi lalu melarikan diri ke arah Sungai Tangka sedangkan korban yang berusaha bangkit dihampiri oleh terdakwa I Sri Buyung lalu menendang ke arah wajah korban yang masih bisa ditangkis oleh korban tetapi tendangan berikutnya korban tidak dapat menangkisnya lagi sehingga mengenai wajah korban yang dilakukan beberapa kali. Saat korban berusaha melarikan diri, dari arah belakang saksi Takdir Bin Jaya menendang kaki korban, lalu korban dikejar oleh terdakwa I Sri Buyung, Guntur (DPO), Jonathan (DPO), Nurfan Alias Ippang (DPO) dan beberapa orang terdakwa lainnya, setelah korban didapat, korban lalu dikeroyok dengan cara dipukul dan ditendang. Korban kembali berusaha melarikan diri tetapi dicegat oleh terdakwa Muhammad Syukur Bin Muh. Arfah dan terdakwa Adnan HS (masing-masing sebagai terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), terdakwa Muhammad Syukur Bin Muh. Arfah lalu meninju pada bagian kepala, korban yang terus mencoba melarikan diri dikejar oleh Adnan HS dan memukul punggung korban sebanyak tiga kali, lalu Muhammad Syukur Bin Muh. Arfah membusur ke arah punggung korban dan menancap di punggung korban. Dalam keadaan terkena busur korban tetap berusaha melarikan diri yang kembali dikejar oleh terdakwa Asrul Manyingari dan Rizal Jaya (masing-masing sebagai terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), terdakwa Asrul Manyingari lalu menendang korban pada bagian paha sedangkan Rizal Jaya memukul wajah korban berulang kali. Setelah melakukan pemukulan Rizal Jaya lalu mengambil busur yang berada di motornya, sekitar 10 meter dari arah korban, Rizal Jaya lalu mengarahkan busur ke arah korban yang mengenai leher sebelah kiri korban, korban yang masih saja terus berlari dikejar Jonathan, setelah menggapainya Jonathan lalu mencabut busur yang menancap pada punggung korban, terdakwa II Andana Arib Abbas, Syarifuddin Alias Encong Bin Dg. Pudding (DPO), Guntur (DPO) serta terdakwa lainnya kemudian memukul serta menginjak-injak korban. Akibat perbuatan para terdakwa korban meninggal dunia.

Berdasarkan Visum et Repertum No. R/ 19/ Ver/ IV/ 2012 yang dibuat oleh dr. Firmansyah, kelainan-kelainan luka pada saat masuk rumah sakit dan yang terdapat pada pemeriksaan pertama atau pertolongan pertama sebagai berikut :

- Didapat luka robek diatas alis mata kiri berukuran 2 cm x 1cm 2 cm
- Tidak terdapat perlukaan di tempat lain, dari mulut, hidung dan telinga mengeluarkan darah segar.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Budiyanto Budiman

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda lainnya.
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk menjadi saksi berkaitan dengan kasus pembunuhan
- Bahwa kejadian pembunuhan pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012 sekitar pukul 23.00 Wita.
- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 14 April 2012 saksi dan korban menghadiri acara syukuran SAPMA PP, kemudian sekitar pukul 23.00 Wita acara syukuran tersebut selesai kemudian kami pulang bersama dengan teman-teman, pada saat itu saksi berboncengan dengan korban dengan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 40 km/jam, pada waktu saksi dan korban ada di Jalan Sungai Saddang saksi diikuti oleh geng motor sekitar 10 (sepuluh) orang yang saling berboncengan lalu mengejar saksi dan korban lalu menghentikan sepeda motor saksi dan korban dengan cara pelaku menendang sepeda motor yang saksi gunakan tersebut sehingga kami jatuh.
- Bahwa sepeda motor yang saksi pakai adalah milik korban dan ciri-ciri sepeda motor yang mengikuti adalah sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam.
- Bahwa pada waktu itu orang yang mengendarai sepeda motor Vega membusur tetapi saksi menghindar dan sepeda motor saksi ditendang sehingga saksi dan korban terjatuh dan setelah itu saksi lari meninggalkan sepeda motor.
- Bahwa saksi dari Hotel Horisob mau kembali ke asrama dan saksi melihat orang yang memakai sepeda motor Vega mengikuti waktu di Jalan Sungai Saddang.
- Bahwa antara kami dengan orang yang naik sepeda motor Vega tidak ada persoalan sebelumnya.
- Bahwa almarhum tidak pernah bercerita kepada saksi bahwa almarhum pernah ada persoalan dengan orang lain.
- Bahwa saksi tidak tahu ciri-ciri orang yang mengendarai sepeda motor tersebut.

- Bahwa yang mengejar saksi dan korban ada sekitar 10 (sepuluh) sepeda motor dan saksi tidak melihat korban di kroyok karena pada waktu itu lampu penerangan remang-remang.
- Bahwa saksi sempat sibrusur tetapi tidak kena.
- Bahwa saksi dengar suara sepeda motor geng motor dan ada sekitar 10 (sepuluh) sepeda motor yang mengejar saksi dan korban.
- Bahwa tidak ada teriakan dari arah belakang yang saksi tahu kalau ada yang membusur korban.
- Bahwa pada waktu kejadian teman-teman saksi sudah ada jauh didepan sepeda motor saksi dan korban dan jarak antara teman-teman saksi dan korban sendiri berjarak sekitar 50 meter.
- Bahwa yang menendang sepeda motor saksi adalah orang yang berboncengan yang memakai sepeda motor warna hitam dan yang menendang adalah orang yang dibonceng dan orang yang menendang tersebut menendang body sepeda motor saksi dan pada waktu itu sepeda motor yang saksi dan korban pakai terjatuh.
- Bahwa yang dilakukan oleh geng motor sebelum menedang adalah terlebih dahulu membusur.
- Bahwa selain sepeda motor Vega yang memburu masih ada lagi kelompok dari geng motor yang memburuh saksi dan korban.
- Bahwa pada waktu itu saksi dan korban memakai sepeda motor Honda Beat.
- Bahwa posisi sepeda motor yang lain memburu berada di belakang sebelah kanan saksi dan pada waktu diburu saksi terjatuh di Jaln Sungai Saddang persisnya didepan salon fifi violet.
- Bahwa pada waktu saksi saksi dan korban terjatuh saksi masih sempat melihat korban dan waktu terjatuh korban sudah dikerumuni dan pada waktu terjatuh saksi masih sempat berlari dan setelah saksi berlari dan berbelok ke Jaln Sungai Tangka saksi sudah tidak melihat korban lagi.
- Bahwa saksi tahu korban meninggal dunia setengah jam kemudian kalau korban sudah meninggal di rumah sakir Pelamonia.
- Bahwa saksi sempat ke rumah sakit pelamonia dan disana saksi melihat korban sudah meninggal dunia dan yang saksi lihat pada tubuh korban ada luka tusuk di punggung, kepala bagian belakang dan dada sedangkan di bagian muka/wajah korban saksi tidak perhatikan.
- Bahwa korban di rumah sakit karena dibawa oleh teman saksi yang bernama Wawan.

- Bahwa di Jalan Sungai Saddang saksi dibusur terlebih dahulu kemudian saksi dikejar lagi dan sepeda motor saksi ditendang.
- Bahwa pada waktu itu tidak ada orang yang saling menghasut atau Appagara dan tidak ada orang yang mengatikan perkataan kotor.
- Bahwa saksi tidak mendengar kata buru “ondangi”.
- Bahwa pada waktu saksi berlari sempat berpikir untuk menolong korban tetapi saksi berpikir kalau saksi kembali maka saksi akan mati konyol.
- Bahwa alat yang dibawa oleh geng motor adalah busur dan membusur adalah orang yang dibonceng.
- Bahwa warna baju korban pada saat itu adalah warna hitam abu-abu.

2. Saksi Ilham Jaya

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa
- Bahwa saksi kenal dengan korban karena berteman
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sekaitan dengan kematian korban Ibrahim pada tanggal 14 April 2012.
- Bahwa terakhir saksi bertemu korban saat di lampu merah Sungai Saddang sehabis menghadiri acara di Hotel Horison.
- Bahwa saat pulang di Jalan Sungai Saddang ada motor yang mengejar kami.
- Bahwa pengendara motor yang mengejar kami membawa batu dan busur.
- Bahwa dengan melihat motor yang mengejar membawa senjata, saksi membawa lari motor samapai Asrama.
- Bahwa jarak saksi dan korban sekitar 70 meter saat saksi menoleh kebelakang.
- Bahwa saat keluar dari hotel menuju pulang situasi dan keadaan normal-normal saja tidak mendengar ada pembicaraan.
- Bahwa saksi tidak kembali untuk menolong korban karena takut kepada orang-orang yang mengejar.
- Bahwa saksi mengetahui kondisi korban dari teman yang menerima kabar via telepon 15 menit setelah tiba di asrama.
- Bahwa yang membawa korban ke rumah sakit adalah Wahyudin.

3. Saksi Awal Afrianto

- Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa
- Bahwa saksi kenal dengan korban karena teman kampus.
- Bahwa sesaat sebelum kejadian saksi pulang bersamaan dengan korban sehabis menghadiri acara di Hotel Horison.
- Bahwa Saksi berpisah dengan korban saat membelok didepan lampu merah Sungai Saddang.
- Bahwa saat berpisah tersebut saksi berada didepan dan menoleh kebelakang serta melihat korban yang berboncengan jatuh.
- Bahwa saksi menyuruh teman yang membonceng untuk berhenti dan ingin menolong korban tetapi karena karena banyak yang mengejar dengan membawa busur dan batu akhirnya saksi naik kembali keatas motor dan lari menuju asrama.
- Bahwa sebelum kejadian keadaan normal-normal saja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab korban terjatuh dari motor dan saat korban jatuh saksi melihat banyak yang berkerumun.
- Bahwa saksi mengetahui kondisi korban saat tiba di rumah sakit dan melihat banyak luka disekujur tubuhnya dan dari kepala luka berdarah serta luka bekas dibusur dan dadanya terasa lembek.
- Bahwa jumlah motor yang mengejar sekitar 20 orang dan kesemuanya naik motor.
- Bahwa saksi melihat orang yang membusur karena jaraknya sekitar 50 meter tetapi tidak kenal ciri-cirinya karena lampu jalan tidak terlalu terang.
- Bahwa selain yang membawa busur saksi juga melihat ada yang membawa parang.

4. Saksi M. Imra

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi tersebut semua benar.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan korban karena korban adalah satu kamar di asrama dan saksi dan korban satu organisasi juga.
- Bahwa saksi terakhir ketemu dengan korban di tempat kegiatan yaitu di hotel Horison Makassar, kegiatan yang dilakukan di hotel Horison adalah kegiatan acara syukuran

SAPMA PP, dan makan malam dan aksi masih sempat melihat korban pada waktu mau pulang karena saksi dan korban pulang bersamaan.

- Bahwa pada waktu korban pulang korban mengendarai sepeda motor dan saksi juga mengendarai sepeda motor.
- Bahwa saksi dan korban keluar dari hotel secara bersamaan dan saksi berada di depan dan korban berada di belakang.
- Bahwa pada malam itu kami semua keluar hotel situasi normal-normal saja dan di jalan juga tidak ada yang saling menantang.
- Bahwa jarak sepeda motor di depan dan jarak sepeda motor yang ada di belakang berjarak 50 meter.
- Bahwa saksi tahu kejadian karena ada adik yang menyampaikan kalau ada kejadian dan mengatakan bahwa anak-anak diserang di belakang dan setelah mendengar penyampain tersebut saksi berhenti dan ingin menyelamatkan dan pada waktu itu saksi tidak sempat melihat korban di tempat kejadian karena saksi sudah dikerumuni.
- Bahwa sebelumnya saksi diserang terlebih dahulu dan saksi lihat ada yang membawa busur dan parang.
- Bahwa saksi tidak sempat melihat korban karena saksi dibusur dan anak busur tersebut sempat mengenai aspal dan aspal tersebut mengeluarkan percik api dan hal tersebut terjadi di samping saksi.
- Bahwa saksi tahu waktu saksi ada di asrama dan sekitar 10 (sepuluh) menit setelah saksi tiba di asrama saksi tahu kalau korban sudah meninggal dunia dan setelah saksi tahu kalau korban meninggal dunia saksi langsung kerumah sakit pelamonia.
- Bahwa saksi sempat melihat korban di rumah sakit pelipis dan punggung robek dan di paha ada bekas busur.
- Bahwa waktu kejadian saksi melihat ada orang yang membawa parang dan ada juga mengejar pakai sepeda motor melontarkan anak busur dan busur tersebut diarahkan kepada saksi.
- Bahwa yang membawa parang tersebut lari mengejar saksi tetapi parang tersebut tidak digunakan.
- Bahwa kalau dikatakan memancing saksi yang menggas motor, karena sepeda motor saksi adalah sepeda motor Ninja maka suaranya agak keras dan tidak ada maksud apa-apa saksi menggas motor keras-kerang.
- Bahwa yang saksi lihat 1 (satu) orang yang lari dan 1 (satu) orang berdiri di atas sepeda motor berboncengan dan ada 1 (satu) orang membawa parang dan yang membawa parang tersebut memakai topeng.

5. Saksi Muh. TakdirBin Jaya

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan para Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa baik hubungan sedarah maupun hubungan semenda dengan para terdakwa.
- Bahwa waktu kejadian saksi ada dirombongan belakang naik sepeda motor bersama Rian dan saksi dibonceng oleh Rian.
- Bahwa sebelum kejadian saksi dan teman-teman berkumpul di jalan Pettarani menuju Tanjung dengan rute melalui Jalan Sungai Saddang.
- Bahwa pada saat di jalan Sungai Saddang saksi berteman bertemu dengan korban berkata-kata kotor dan korban mengatakan awas disitu korban berbahasa kotor.
- Bahwa pada saat korban berkata-kata kotor kelompok saksi berhenti.
- Bahwa kelompok korban dari arah Sudirman jadi kelompok saksi dan kelompok korban berlawanan arah.
- Bahwa kelompok saksi berhenti karena kelompok korban mengatakan awasko dan korban berbahasa kotor.
- Bahwa selanjutnya kelompok saksi mengejar kelompok korban dan yang mengejar korban adalah Jonathan dan selanjutnya Jonathan dan sepeda motor korban terjatuh.
- Bahwa setelah korban terjatuh saksi hanya berdiri saja disamping sepeda motor dan pada waktu itu Jonathan melakukan pemukulan terhadap korban dan selain Jonathan yang memukul yang memukul korban adalah anak dari Sudiang.
- Bahwa keadaan korban setelah dipukul yaitu tengkurap di tanah dan tidak bergerak lagi.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah korban meninggal dunia di tempat kejadian atau tidak.
- Bahwa saksi tahu kalau korban meninggal dunia nanti setelah saksi ditangkap keesokan harinya.
- Bahwa kelompok saksi dan kelompok korban sebelumnya tidak ada masalah.
- Bahwa saksi bersama teman-teman sering berkumpul di jalan Pettarani dan teman-teman saksi datang di Jalan Pettarani satu-satu dan kami tidak janji hanya spontan saja dan pada waktu kumpul tersebut teman-teman saksi minum minuman beralkohol yang bermerk Topi Miring dan pada waktu itu ada 3 (tiga) botol Topi Miring yang diminum.
- Bahwapada waktu itu tidak semua teman saksi yang ikut minum minuman beralkohol tersebut.

- Bahwa yang menggerakkan untuk jalan adalah Jonathan.
- Bahwa malam itu teman-teman saksi sebanyak 20 motor.
- Bahwa teman saksi hanya sebagian yang mengejar korban dan korban didapat di jalan Sungai Saddang dan selanjutnya korban terjatuh karena stir sepeda motor korban miring.
- Bahwa teman saksi mengatakan sama saksi awas sepeda motor korban mau jatuh dan pada saat itu sepeda motor teman saksi berhenti juga dan tidak semua teman saksi ikut memukul korban.
- Bahwa da teman saksi yang memukul pakai besi dan waktu dipukul korban kena pada bagian punggung.
- Bahwa korban masih sempat berlari tetapi dikejar lagi dan terjatuh selanjutnya korban di injak-injak lagi dan dipukul.
- Bahwa saksi tidak melihat korban dipanah hanya saksi lihat ada orang yang membusur korban adalah Jonatahan.
- Bahwa saksi saksi tidak tahu lagi dimana keberadaan Jonathan.
- Bahwa para terdakwa ikut mengejar korban pada malam itu tetapi saksi tidak melihat para terdakwa menendang korban.
- Bahwa saksi mendengar korban berteriak kesakitan tetapi tetap dipukul.
- Bahwa saksi tidak melakukan apa-apa hanya berdiri disekitar kejadian saja.
- Bahwa jarak antara korban dengan saksi waktu dipukul adalah sekitar 5 (lima) meter.
- Bahwa waktu saksi pulang saksi berboncengan dengan Rian nati setelah mau sampai dirumah baru saksi pindah sepeda motor dan dibonceng dengan Tolle.
- Bahwa saksi membawa busur dan ketapel yang diperoleh dari lorong tempat tinggal saksi.
- Bhwa anak Sudiang membawa potongan besi sedang pisau dan parang saksi tidak lihat.
- Bahwa busur yang diberikan kepada Syukur adalah warna hitam.
- Bahwa setelah memeberikan busur dan ketapel kepada Syukur saksi dan teman-teman berkeliling lagi.
- Bahwa saksi mendapat busur tersebut dari lorong dan saksi ketemu busur tersebut sebelum saksi bertemu dengan korban.
- Bahwa besi tersebut anak Sudaing yang membawa.
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa.
- Bahwa pada waktu kejadian saksi melihat darah ditanah disekitar badan korban.

- Bahwa busur tersebut saksi serahkan ke Jonathan dan Jonathan menyerahkan busur tersebut kepada Syukur dan saksi serahkan busur tersebut sebelum kejadian.
- Bahwa saksi ditangkap Minggu subuh-subuh karena teman saksi yang ditangkap terlebih dahulu adalah Asrul dan Asrul bisa ditangkap karena mogok sepeda motornya dan Asrul ditangkap oleh masyarakat dan saksi juga ditangkap karena ditunjuk oleh Asrul.
- Bahwa jarak antara saksi dan Asrul waktu kejadian sangat dekat.
- Bahwa saksi tidak lihat para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban.
- Saksi katakan ikut memukul waktu diperiksa di kantor polisi karena saksi dipukul oleh polisi.
- Bahwa anak dari Sudiang datang sendiri bergabung di kelompok saksi dan anak Sudiang yang datang adalah satu sepeda motor berboncengan tiga dan baru malam itu saksi ketemu dengan anak dari Sudiang.
- Bahwa saksi tidak tahu nama anak dari Sudiang tersebut.
- Bahwa saksi sudah lama kenal Jonathan karena Jonathan adalah anak kelapa tiga.
- Bahwa saksi tidak mendengar bunyi suara sepeda motor menggas keras-keras
- Bahwa tidak ada senggolan motor antara kelompok korban hanya saling ejek saja.

6. Saksi Ansar Bin Hakim

- Bahwa sebelum kejadian saksi berkumpul di Jalan Pettarani tepatnya didepan Kawasaki dan rencana akan menuju Tanjung lewat Jalan Sungai Saddang.
- Bahwa saat diJalan Sungai Saddang dan berpapasan dengan kelompok korban serta mengejek kelompok kami, Syukur yang mendengar hal tersebut, dan selanjutnya kelompok kami melakuakn pengejaran terhadap kelompok korban.
- Bahwa yang kejar korban sebanyak 3 motor dari kelompok kami.
- Bahwa saat dikejar korban jatuh dari motornya lalu berusaha lari lagi tetapi karena banyak yang kejar akhirnya korban dipukuli sampai tidak bangun lagi.
- Bahwa orang yang pukul korban tidak semua saksi kenal.
- Bahwa saksi tidal lihat para terdakwa melakuakn pemukulan terhadap korban, hanya melihat Syukur yang membusur korban.

- Bahwa jarak saksi dengan korban setelah jatuh sekitar 10 meter.
- Bahwa saat kejadian banyak masyarakat yang melihat.

7. Saksi Dedy Haryadi

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan para Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa baik hubungan sederhana maupun semenda dengan para terdakwa.
- Bahwa saksi ikut juga kumpul dengan para terdakwa di Jalan Pettarani sebelum kejadian dan ke Jalan Sungai Saddang menuju Tanjung.
- Bahwa saksi berpapasan dengan kelompok korban di Jalan Sungai Saddang.
- Bahwa kejadian pembusuran saksi hanya dengar cerita tidak lihat langsung.
- Bahwa saksi tidak melihat para terdakwa di lokasi kejadian.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi tersebut semua benar.

8. Saksi Muhammad Agustaman

- Bahwa saksi ikut pula kumpul-kumpul di jalan Pettarani sebelum kejadian.
- Bahwa saksi berboncengan dengan terdakwa Sri Buyung pada saat berangkat tetapi saat pulang tidak lihat lagi.
- Bahwa tujuan saksi dan teman-teman ke arah pantai melalui jalan Sungai Saddang.
- Bahwa saat berpapasan dengan kelompok korban jarak saksi dengan korban kira-kira 3 meter.
- Bahwa saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan benar.
- Bahwa saat kejadian pemukulan banyak masyarakat melihat.

9. Saksi Muhammad Syahrul

- Bahwa pada waktu kejadian saksi tidak melihat para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dan

melihat Terdakwa Syukur mengambil busur dari kantongnya tetapi tidak melihat melontarkan busur tersebut.

- Bahwa saksi tidak melakukan apa-apa hanya melihat saja dan setelah korban tidak bergerak , saksi pulang ke rumah boncengan dengan Ansar.

10. Saksi Rizal Jaya

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi tersebut semua benar.
- Bahwa sebelum kejadian saksi kumpul-kumpul di jalan Pettarani, kemudian berjalan ke arah Sungai Saddang.
- Bahwa saksi berboncengan dengan istri saksi pada saat kejadian.
- Bahwa saat berada di persimpangan Jalan Sudirman dan Sungai Saddang kami berpapasan dengan kelompok sepeda motor korban.
- Bahwa pada waktu berpapasan teman almarhum berteriak “apa liat-liat...”.
- Bahwa kemudian saksi melihat Jonathan kejar korban dan korban jatuh 2 kali terakhir korban jatuh tidak bangun lagi karena dipukuli oleh Jonathan dan anak Sudiang beramai-ramai.
- Bahwa saksi sempat turun tegur dan mengingatkan anak-anak yang lain dengan kata-kata “....sudahmi....”.
- Bahwa peringatan tersebut saksi tujukan kepada Jonathan serta anak-anak lain yang melakukan pemukulan terhadap korban.
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat apa yang diperbuat para terdakwa dan mereka berada dekat dengan saksi.
- Bahwa saksi melihat Jonathan melakukan pemukulan dan pembusuran dan melihat anak sudiang memukul pakai besi.
- Bahwa saksi tidak melihat kondisi korban selanjutnya karena setelah memberi peringatan kepada Jonathan, saksi kembali ke motor dimana istri saksi menunggu.
- Bahwa saksi kenal Jonathan karena bertetangga rumah.
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan para terdakwa.
- Bahwa ada sekitar 15 (lima belas) sepeda motor yang berkumpul di jalan Pettarani.
- Bahwa pada waktu berpapasan dengan kelompok korban saksi mendengar kata-kata “Ondangi” (kejar) dan yang

mengeluarkan kata-kata “Ondangi” (kejar) adalah Jonathan.

- Bahwa selain memukul Jonathan melakukan pembusuran terhadap korban.

11. Saksi Adnan HS.

- Bahwa saksi pada waktu itu berboncengan dengan Syukur.
- Bahwa pada waktu itu posisi sepeda motor saksi ada ditengah-tengah rombongan kelompok saksi.
- Bahwa saksi melihat ada gelagat yang tidak normal pada waktu di lampu merah Jalan Sudirman dan Sungai Saddang.
- Bahwa yang saksi lihat adalah teman korban yang membunyikan gas sepeda motornya keras-keras.
- Bahwa selain membunyikan gas motor saksi diberitahu oleh Syukur bahwa mereka jua berbicara kotor.
- Bahwa mendengar hal itu saksi yang membonceng Syukur balik arah dan kejar korban atas komando Jonathan.
- Bahwa jenis motor yang dikendarai oleh Jonathan adalah Yamaha Vega.
- Bahwa Jonathan dibonceng oleh teman.
- Bahwa saat korban dikejar dan jatuh dan lihat Syukur membusur korban kena bagian belakangnya.
- Bahwa saksi melihat Jonathan membusur, anak Sudiang memukul pakai besi dan saksi memukul pakai tangan sebanyak 3 kali kepada korban.
- Bahwa saksi tidak melihat para terdakwa melakukan pemukulan.
- Bahwa pada malam itu Jonathan berboncengan dengan Agus tetapi saksi tidak melihat apakah Jonathan yang mengejar duluan atau tidak.
- Bahwa posisi saksi pada waktu itu ada disebelah sepeda motor korban.
- Bahwa yang saksi lihat hanya terdakwa Syukur yang membusur dan saksi melihat Andana dan Takdir menginjak-injak korban.
- Bahwa saksi tidak melihat Jonathan membusur saksi kena bagian apanya.
- Bahwa pada saat terdakwa Syukur membusur posisi terdakwa Syukur ada dibelakang saksi.
- Bahwa pada saat itu korban masih sempat berlari.
- Bahwa korban saat jatuh pertama kali sempat melakukan perlawanan tetapi karena jumlah kelompok kami lebih

banyak dan melakukan pengeroyokan sehingga perlawanannya sia-sia.

- Bahwa bentuk perlawanan korban adalah membanta senjata tajam semacam badink yang diambil dari sadel motornya sewaktu jatuh.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, para terdakwa juga telah memberikan keterangan dipersidangan yang intinya sebagai berikut:

Terdakwa I. Sri Buyung Alias Buyung

- Bahwa awalnya terdakwa saat kejadian hanya duduk diatas motor dan melihat korban dipukuli.
- Bahwa setelah korban terjatuh dan dipukul ramai-ramai, terdakwa mendekat dan menginjak korban sebanyak 1 kali.
- Bahwa saat menginjak korban terdakwa tidak memperhatikan kondisi korban.
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa kumpul bersama teman-teman yang lain di Jalan Pettaranai, tetapi tidak ikut minum.
- Bahwa terdakwa boncengan dengan Adnan.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan merasa bersalah.
- Saat terdakwa diperiksa di penyidik kepolisian di dampingi oleh Penasehat Hukum.
- Bahwa terdakwa dan teman-teman ada di jalan Pettarani berkumpul hanya kebetulan saja.

Terdakwa II. Andana Arib Abbas

- Pada waktu kumpul-kumpul di Jalan Pettarani terdakwa tidak minum minuman beralkohol.
- Bahwa waktu terdakwa diperiksa di penyidik kepolisian terdakwa di dampingi Penasehat Hukum.
- Bahwa terdakwa belakangan datang ditempat kejadian.
- Bahwa saat dilokasi sudah banyak orang yang berkerumun dan korban tidak bergerak lagi.
- Bahwa terdakwa menginjak korban sebanyak 1 kali karena tidak sengaja akibat terdorong.
- Bahwa akibat kejadian ini terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dipersidangan telah pula diajukan Barang Bukti berupa :

1. 1 lembar jeans warna biru berlumuran darah.
2. 3 buah batu kali.
3. 1 buah pecahan keramik.
4. 2 buah pelontar busur atau ketapel terbuat dari besi.
5. 4 buah anak busur atau panah.
6. 1 unit sepeda motor merk Honda Beat DD 2993 IM, warna putih/kuning.
7. 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio DD 6221 AP, warna merah.
8. 1 unit sepeda motor merk Satria FU DD 3984 VR, warna hitam bis merah.
9. 1 unit sepeda motor merk Suzuki Shogun DD 6484 IW, warna merah.
10. 1 unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR DD 4388 OM, warna merah maron.
11. 1 buah HP Nokia E 6
12. 1 buah HP Black Berry Bold
13. 1 buah HP Black Berry Torch.
14. 15 lembar uang pecahan Rp. 50.000,-
15. 1 buah korek gas.
16. 2 buah Kartu Mandiri.

17.1 buah KTP atas nama Andi Hendra.

18.1 lembar Bill Pembayaran Studio 33.

Menimbang, bahwa atas Barang Bukti tersebut, baik saksi-saksi maupun terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta Barang Bukti yang diajukan dipersidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, ternyata terdapat persesuaian, sehingga Majelis Hakim dapat menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar para Terdakwa telah diperiksa dan memberikan keterangan pada tingkat Penyidikan dan keterangan para Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Sungai Saddang Kota Makassar, telah terjadi perselisihan paham antara beberapa orang yang mengendarai sepeda motor yang terdiri dari kelompok para terdakwa dan kelompok pihak korban Ibrahim Samsari.
- Bahwa benar kejadian itu bermula ketika kelompok para terdakwa selesai mengadakan acara kumpul-kumpul di Jl. AP. Pettarani Makassar, tepatnya di depan Showroom Kawasaki.
- Bahwa benar setelah itu, para terdakwa bersama dengan temannya yang berjumlah 15 sepeda motor berkonvoi keliling kota.
- Bahwa benar pada saat itu juga, kelompok korban Ibrahim Samsari baru selesai menghadiri acara sukuran SAPMA PP (Satuan siswa pelajar dan mahasiswa pemuda Pancasila) yang diadakan di Hotel Horison Jalan Jendral Sudirman.
- Bahwa benar selanjutnya saksi Budiyanto Budiman yang berboncengan dengan korban Ibrahim Syamsari dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih kuning dengan No. pol. DD 2993 IM milik korban bersama 5 motor lainnya milik teman saksi melintas di Jalan Jenderal Sudirman Makassar.

- Bahwa benar disaat yang bersamaan para terdakwa dari Jalan Ratulangi juga melintas dijalan tersebut, karena merasa ditantang pada saat berpapasan di Jalan itu, Jonathan (DPO) lalu berteriak dengan mengatakan “Ondangi-ondangi” yang artinya : “kejar dia”.
- Bahwa benar pada saat itu motor dikendarai oleh terdakwa Sri Buyung yang berboncengan dengan Adnan serta para terdakwa lainnya memutar arah mengejar korban dan teman-temannya ke arah Jalan Sungai Saddang.
- Bahwa benar saat berada di Jalan Sungai Saddang salah satu dari pelaku yang bernama Jonathan yang menggunakan motor Honda Legenda memukul dengan menggunakan pipa besi secara berulang kali pada bagian kepala korban.
- Bahwa benar sebelum pemukulan itu, saat berada di depan studio foto glow, teman terdakwa yang menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR memepet motor yang dikendarai oleh saksi Budiyanto Budiman bersama dengan korban hingga ke pinggir jalan.
- Bahwa benar Jonathan kemudian menedang motor Budiyanto Budiman yang mengakibatkan saksi Budiyanto Budiman bersama dengan korban terjatuh dengan motornya.
- Bahwa benar setelah terjatuh saksi Budianto Budiman lalu bangkit dan melarikan diri ke arah Sungai Tangka sedangkan korban yang berusaha bangkit dihampiri oleh Sri Buyung, yang juga teman dari kelompok para terdakwa, lalu menendang ke arah wajah korban yang mana tendangan pertama masih dapat ditangkis oleh korban tetapi tendangan berikutnya korban tidak dapat menangkisnya lagi sehingga mengenai wajah korban yang dilakukan beberapa kali.
- Bahwa benar saat berusaha melarikan diri, dari arah belakang saksi Takdir Bin Jaya memendang kaki korban, korban lalu dikejar oleh Sri Buyung, Guntur (DPO), Jonathan (DPO), Nurfan (DPO) dan beberapa orang terdakwa lainnya.
- Bahwa benar setelah kelompok para terdakwa berhasil menjatuhkan, korban lalu dikroyok dengan cara di pukul dan ditendang. Namun korban kembali berusaha melarikan diri tetapi dicegat oleh Muhammad Syukur Bin Muh. Arfah dan Adnan HS.
- Bahwa benar Muhammad Bin Sykur Bin Muh. Arfah lalu memukul korban beberapa kali dengan kepala tangangan (tinju) pada bagian kepala korban, korban yang terus berusaha melarikan diri dikejar oleh Adnan HS dan dari

arah belakang Adnan HS memukul korban pada bagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa benar selanjutnya dari arah belakang korban, Muhammad Syukur Bin Muh. Arfah dengan menggunakan busur (panah) lalu mengarahkan busur tersebut ke arah korban yang menancap pada punggung korban.
- Bahwa benar dalam keadaan terkena busur korban tetap berusaha melarikan diri yang kembali dikejar oleh Asrul Manyingari dan Rizal Jaya, lalu menendang korban pada bagianpaha sedangkan Rizal Jaya memukul korban secara berulang kali pada bagian wajah korban.
- Bahwa benar setelah melakukan pemukulan Rizal Jaya lalu kembali ke motornya dan mengambil busur, sekitar 10 (sepuluh) meter dari arah korban, Rizal Jaya mengarahkan busur ke arah korban yang mengenai leher sebelah kiri korban, korban yang masih terus berlari dikejar oleh Jonathan.
- Bahwa benar setelah menggapainya Jonathan lalu mencabut busur yang menancap pada punggung korban dan menendangnya yang mengakibatkan korban jatuh dengan posisi tengkurap, dalam keadaan tengkurap Jonathan lalu mengarahkan kembali busur itu ke arah korban yang mengenai punggung korban.
- Bahwa benar selanjutnya Andana Arib Abbas, Syarifuddin (DPO), Guntur (DPO) serta terdakwa lainnya kemudian memukul serta menginjak-injak korban. Akibat perbuatan para terdakwa korban meninggal dunia.
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut bersama dengan kelompoknya, korban mengalami luka dan meninggal dunia, berdasarkan Visum et Repertum No. R/ 19/ Ver/ IV/ 2012 yang dibuat oleh dr. Firmansyah dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit TK II 07.05.01 Pelamonia Makassar.
- Bahwa benar para terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, telah memenuhi unsur-unsur dari tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, yakni :

Kesatu : Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP

Kedua : Pasal 351 ayat (3) KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang dipandang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yakni Dakwaan Primair, melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”
2. Unsur “Dengan Terang-terangan dan Tenaga Bersama”
3. Unsur “Melakukan Kekerasan yang Mengakibatkan Matinya Orang”

Menimbang, bahwa mengenai unsur ad 1. “Barang Siapa” Majelis mempertimbangkan bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” dalam dakwaan ini adalah setiap orang atau Badan Hukum selaku Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta tidak berada atau digantungkan pada suatu kedudukan atau kualitas tertentu.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dapat mengikuti persidangan dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, sehingga demikian menurut hemat Majelis, Para Terdakwa adalah termasuk dalam kategori subjek Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ad 1. “Barang Siapa” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk unsur ad 2. “Dengan Terang-terangan dan Tenaga Bersama” dan unsur ad 3. “Melakukan Kekerasan yang Mengakibatkan Matinya Orang” Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut bersama dengan kelompoknya, korban mengalami luka dan meninggal dunia, berdasarkan Visum et Repertum No. R/ 19/ Ver/ IV/ 2012 yang dibuat oleh dr. firmansyah dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit TK II 07.05.01 Pelamonia Makassar.

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan dan dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa rangkaian kejadian mulai dari adanya teriakan dari salah satu anggota kelompok terdakwa yang bernama Jonathan bahwa “Ondangi-ondangi” yang berarti “kejar dia-kejar dia” yang selanjutnya direspon oleh para terdakwa bersama dengan teman-temannya dengan mengejar korban sesuai dengan apa yang diserukan oleh anggota kelompok terdakwa tersebut, yang berakhir dengan kejadian meninggalnya korban sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian itu pula, sama sekali tidak terlihat adanya tindakan dari kelompok terdakwa untuk berusaha mencegah atau berusaha menghalangi serangan yang ditujukan terhadap korban, bahkan justru terjadi sebaliknya, yakni para terdakwa berusaha menunjukkan dan menghimpun kekuatan dan tenaga bersama dengan peran masing-masing sebagaimana diuraikan di atas. Sehingga korban tidak berdaya dan akhirnya meninggal dunia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis berpendapat pula bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan tersebut dihubungkan dengan Visum Et Repertum di atas, maka kematian dari Korban Ibrahim Samsari adalah mempunyai korelasi atau hubungan timbal balik dan sekaligus memiliki hubungan sebab akibat yang kuat dengan tindakan para terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ad 2 dan ad 3 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur yang didakwakan dalam Dakwaan telah terpenuhi, maka para terdakwa secara hukum harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu tersebut, sedangkan dakwaan lainnya dipandang tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Tuntutan Pidananya tersebut di atas dan tidak sependapat dengan Penasihat

Hukum Terdakwa, dan olehnya itu permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa agar terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dan mohon membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut, sebagaimana tertuang dalam Nota Pembelaan tertanggal 26 Juni 2012, adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar atas diri dan perbuatan Para Terdakwa, justru Majelis berkeyakinan bahwa Para Terdakwalah pelaku dari tindak pidana tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kadar kesalahannya dan dibebani pula membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa diperiksa dengan proses Hukum Acara Peradilan Anak, yang memberikan kewenangan kepada Hakim untuk menjatuhkan pidana atau tindakan, maka setelah Majelis mencermati Hasil Pemeriksaan Penelitian Petugas Pembimbing Kemasyarakatan tertanggal 2 Mei 2012, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya menyarankan agar para terdakwa dijatuhi tindakan untuk dikembalikan kepada orang tuanya masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, yang dihubungkan dengan efek atau dampak tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka dengan berdasar pada nilai-nilai dan rasa keadilan, maka Majelis berpendapat bahwa adalah lebih tepat jika dijatuhkan atas diri Para terdakwa adalah Pidana Penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan atas diri para terdakwa adalah pidana penjara, dan selama persidangan para terdakwa berada dalam tahanan, maka adalah berdasar hukum jika masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor 19, yang selengkapnya sebagaimana tersebut di atas, setelah majelis mencermatinya, Barang Bukti tersebut adalah merupakan Barang Bukti yang juga dipergunakan dalam berkas perkara lain, yang merupakan splitsing dari perkara ini, sehingga Majelis berpendapat bahwa adalah berdasar hukum jika Barang Bukti yang dimaksud dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai Barang Bukti dalam perkara dimaksud.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa.

a. Hal-hal yang Memberatkan :

- 1) Tindakan terdakwa tersebut dapat menimbulkan perasaan resah dalam masyarakat dan pencitraan serta pengaruh yang buruk bagi keberadaan kelompok geng motor.
- 2) Tindakan para terdakwa menimbulkan perasaan duka yang mendalam bagi keluarga korban.

b. Hal-hal yang Meringankan :

- 1) Para terdakwa masih muda usia sehingga masih diharapkan memperbaiki kelakuannya untuk masa yang akan datang.
- 2) Para terdakwa sopan dipersidangan dan menyatakan rasa penyesalan atas kejadian ini, serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.
- 3) Para terdakwa masih terdaftar dan berstatus sebagai pelajar, dan masih menunjukkan keinginan untuk melanjutkan pendidikannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis hukuman yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sesuai dengan rasa keadilan.

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

2. Analisis Penulis

Dalam wawancara penulis dengan salah satu anggota majelis hakim yang mengadili perkara ini, yaitu Bapak Nathan Lambe (wawancara tanggal 2 April 2013) yang pada dasarnya berpendapat bahwa :

“Dalam pengambilan keputusan dipersidangan ada 3 hal yang menjadi acuannya yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum.
2. Asas Keadilan
3. Asas Manfaat

Untuk kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah peraturan perundang-undangnya. Asas keadilan disinilah cenderung lebih kepada sikap masyarakat, bagaimana mengembalikan/memulihkan keadaan sosial masyarakat sehubungan dengan kasus ini, hal ini juga agar menjadi efek jera kepada orang lain agar tidak diulangi lagi. Asas manfaat biasanya diarahkan kepada terpidana ,jadi jangan sampai pemidanaan yang diberikan ini tidak bermanfaat bagi terdakwa.”

Menurut penulis, selain mengacu pada Ketentuan Umum Pasal 1 angka 9 KUHP dimana wewenang hakim di pengadilan yaitu, mengadili yang merupakan serangkaian tindakan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP, Majelis Hakim juga menggunakan acuan mereka sendiri dalam memytus perkara tersebut yakni asas kepastian Hukum, asas Keadilan, dan asas Manfaat yang mana asas-asas tersebut memiliki peran masing-masing seperti yang dijelaskan di atas. Selain menggunakan

asas-asas tersebut Majelis Hakim mengacu pada Dakwaan dari Penuntut Umum, sesuai dengan fungsi dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dalam proses peradilan pidana. Majelis Hakim juga mempertimbangkan kondisi korban yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada kasus ini.

Lalu Pak Nathan Lambe juga mengatakan (wawancara tanggal 2 April 2013) :

“Menimbang efek dan dampak yang dilakukan para terdakwa maka dengan berdasar pada nilai-nilai rasa keadilan maka Majelis berpendapat sudah tepat atas penjatuhan pidana penjara pada para Terdakwa, yaitu 4 tahun. Karena mengingat para terdakwa tersebut masih muda, karena para terdakwa masih pelajar, sehingga dapat merusak masa depan anak tersebut.”

Berdasarkan analisis penulis tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam perkara putusan No.826/Pid.B/2012/PN.MKS, penulis sependapat dengan hal tersebut karena dalam memutus perkara Majelis Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak. Mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Seperti yang diatur pula pada Buku I Bab II KUHP, yang mana :

Pasal 45;

Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 Tahun, hakim dapat menentukan : memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun;

Atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal

489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

Pasal 47;

- (1) Jika hakim menjatuhkan pidana,
 3. maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga.

Seperti yang dikatakan pada wawancara terakhir penulis oleh Pak

Nathan Lambe (wawancara 4 April 2013), yakni :

“..... karena mereka masih di bawah umur, maka penjatuhan pidananya setengah dari penjatuhan orang dewasa. Majelis juga mempertimbangkan dari alasan-alasan yang meringankan para terdakwa...”

BAB 5

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis, maka penulis menutup skripsi ini dengan memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa I Sri Buyung dan terdakwa II Andana Arib Abbas telah sesuai dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yakni Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP. Hal ini terlihat atas terpenuhinya semua unsur-unsur sesuai dengan pasal yang dikenakan para terdakwa yaitu Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP tentang tindak pidana secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang lain. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut dan tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan menjalani pidana penjara selama 4 (empat) tahun, serta membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah) masing-masing.

2. Dalam memutus perkara perkara Majelis Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak, mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembeda dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Adapun pertimbangan Majelis Hakim yang telah memutus perkara ini yaitu para terdakwa masih usia muda sehingga masih diharapkan memperbaiki kelakuannya untuk masa depan, para terdakwa juga masih terdaftar dan berstatus pelajar, dan masih ingin melanjutkan lagi pendidikannya, tindakan para terdakwa menimbulkan perasaan duka mendalam bagi keluarga korban, serta tindakan para terdakwa dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan pencitraan buruk bagi keberadaan kelompok geng motor.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran dari penulis adalah peran orang tua sangat penting dalam membentuk anaknya. Orang tua harus memiliki kesamaan norma-norma yang dipegang antara ayah, ibu dan keluarga lainnya di rumah tangga dalam mendidik anak-anak. Perbedaan norma dalam cara mengatur anak-anak akan menimbulkan keraguan mereka dan pada gilirannya menimbulkan sikap negatif pada anak dan remaja. Dan orang tua juga harus memberikan pengawasan

secara wajar terhadap pergaulan anak remaja di lingkungan masyarakat. Hal-hal yang perlu diawasi ialah teman-teman bergaulnya, disiplin waktu, pemakaian uang dan ketaatan melakkan ibadah kepada Tuhan. Mengenai teman bergaul banyak hubungannya dengan berhasil tidaknya upaya orang tua mendidik anak. Sebab jika teman bergaul anak adalah orang yang baik maka upaya mendidik akan berhasil baik, sebaliknya jika teman bergaulnya adalah anak-anak yang nakal, maka upaya mendidik anak akan gagal karena pergaulan yang kurang sehat akan merusak upaya pendidikan.

Tindakan yuridis yang dilakukan oleh kepolisian terhadap para pelajar yang melakukan tindakan kriminal dapat diterima. Karena hal itu bermanfaat untuk menciptakan rasa aman dan rasa terlindungi pada masyarakat dari tindak kekerasan dan kekejaman mereka. Akan tetapi masih banyak pula para pendidik, orang tua, dan sebagian besar anggota masyarakat termasuk pers, menginginkan tindakan yuridis hendaknya didasari kearifan dengan mempertimbangkan latar belakang filosofis, sosiologis, dan psikologis yang telah menumbuhkan kerawanan perilaku menyimpang para pelajar.

Memahami latar belakang itu tidak berarti " memanjakan " atau mencari-cari dalih untuk melindungi para remaja, melainkan bertujuan menemukan usaha preventif yang terintegrasi dan terprogram. Sehingga kasus-kasus kenakalan remaja salah satunya geng motor ini tidak hanya

dipecahkan secara yuridis belaka tetapi dilakukannya Pembinaan terhadap remaja yang telah mengalami tingkah laku kenakalan atau yang telah menjalani sesuatu hukuman karena kenakalannya. Hal ini perlu dibina agar mereka tidak mengulangi lagi kenakalannya. upaya ini terutama ditujukan untuk memasyarakatkan kembali anak-anak yang telah melakukan kejahatan, agar mereka kembali menjadi manusia yang wajar. Pembinaan ini diarahkan dalam beberapa aspek yaitu :

1. Pembinaan mental dan kepribadian beragama
2. Pembinaan mental ideologi negara yakni Pancasila, agar menjadi warganegara yang baik
3. Pembinaan kepribadian yang wajar untuk mencapai pribadi yang stabil dan sehat
4. Pembinaan ilmu pengetahuan
5. Pembinaan keterampilan khusus
6. Pengembangan bakat-bakat khusus.

Dan juga aparat kepolisian dan pemerintahan daerah harus tegas dalam menertibkan pengadaan geng-geng motor yang ada di Makassar, sehingga tidak ada lagi kasus-kasus kekerasan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Chandra Pratama, Jakarta, 1996

Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, Refika Adiana, 2011

Koeswadi, Hermien Hadiati. Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1995

Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984

Lilik Mulyadi. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

M. Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana. 2004

M. Sudrajat Bassar, Hukum Pidana (Pelengkap KUHP), Armco, Bandung, 1983

Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, 2004

Muladi, Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, 2005

R. Soeparmono, Hukum Acara Perdatadan Yurisprudensi, Bandung, Mandar Maju, 2005,

Soedarto. 1975. Hukum Pidana Jilid I A-B. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang

Sofyan S. Willis, M.Pd, Remaja dan Permasalahannya, Bandung, 2005

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1993

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press, Malang, 2008

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1989

_____. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Indonesia*, Bandung, 2003

Situs

<http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-jenis-jenis-dan-tujuan.html>

<http://raypratama.blogspot.com/2011/02/perkelahian-kelompok.html>

<http://www.kemhan.com/2012/04/pengertian-geng-motor-kenakalan-remaja.html>

PeraturanPerundang-undangan

KUHPidana, Pasal 170 ayat (1) dan (2)

-----Pasal 339 KUHP

----- Pasal 351 Ayat 3 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1

----- Pasal 353 Ayat (1) – ayat (3)

----- Pasal 355 ayat (1) dan ayat (2)

----- Pasal 358

KUHAP, Pasal 191 ayat (1) dan (2)

-----Pasal 1 angka 9

UU No. 14 Tahun 1970

UU No. 48 Tahun 2009

